



**TATA KELOLA IRIGASI OLEH HIPPA” TIRTOSARI”
DI DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KAPONGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

***IRRIGATION GOVERNANCE BY HIPPA TIRTOSARI
IN KESAMBIRAMPAK VILLAGE KAPONGAN DISTRICT
SITUBONDO REGENCY***

SKRIPSI

Oleh

**Ernawati
NIM 140910302012**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**TATA KELOLA IRIGASI OLEH HIPPA” TIRTOSARI”
DI DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KAPONGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

***IRRIGATION GOVERNANCE BY HIPPA TIRTOSARI
IN KESAMBIRAMPAK VILLAGE KAPONGAN DISTRICT
SITUBONDO REGENCY***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan meraih gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Ernawati
NIM 140910302012**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kemudahan yang meringankan segala urusan ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1) Bapak dan Ibu saya tercinta, Bapak Nawatun dan Ibu Surahmah yang selalu mencintai, mendukung, membimbing dan mendoakan setiap langkah saya dalam menggapai cita-cita;
- 2) Saudaraku tercinta Ely Herawati yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalani hidup;
- 3) Yudis Pranata yang telah memberikan dorongan dan mendoakan setiap langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 4) Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah membimbing dengan dedikasi yang tinggi;
- 5) Almamater yang saya banggakan, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Air sumber kehidupan setiap insan. Air padamkan api dari kemurkaan. Air menghilangkan dahaga dan memberikan kesejukan. Air membenamkan ketinggian dari kesombongan dan keangkuhan. Air mengalir kerendahan untuk mengisi kekosongan dan kehampaan. Dan aku berusaha untuk menjadi bagian dari setitik air.

— **Taufik Saptato Rohadi**¹

¹ <https://jagokata.com/kutipan/kata-api.html/> Diakses tanggal 30 April 2018

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernawati

Nim : 140910302012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Tata Kelola Irigasi Oleh HIPPA Tirtosari Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2018
Yang menyatakan,

Ernawati
Nim. 140910302012

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tata Kelola Irigasi Oleh HIPPA Tirtosari Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Senin, 28 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Raudlatul Jannah S.Sos.,M.Si
NIP.198206182006042001

Prof.Dr.Hary Yuswadi,M.A
NIP. 195207271981031003

Anggota

Drs. Joko Mulyono, M.Si
NIP. 196406062019900310001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr.Ardiyanto,M.Si
NIP.195808101987021002

RINGKASAN

Tata Kelola Irigasi Oleh HIPPA Tirtosari Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo; Ernawati, 140910302012; 2014: 90 halaman; Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberhasilan dalam program ketahanan pangan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam produksi pertanian. Salah satu faktor teknis yang sangat mendukung dalam produktivitas pertanian adalah ketersediaan air irigasi yang baik dan sesuai kebutuhan tanaman. Air merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat khususnya di bidang pertanian. Dalam sistem pengelolaan irigasi terdapat lembaga-lembaga yang dianggap penting untuk mengembangkan dan menyesuaikan kegiatan terhadap perubahan unsur-unsur kelembagaan tersebut. Lembaga tersebut salah satunya adalah terbentuknya HIPPA. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan: (1) Bagaimanakah Tata Kelola Irigasi oleh HIPPA "Tirtosari" di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan alasan bahwa; (1) Desa Kesambirampak merupakan salah satu desa yang paling banyak luas baku sawah dan merupakan sawah teknis yang ada di Kabupaten Situbondo, (2) Desa Kesambirampak mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, (3) Desa Kesambirampak terdapat lembaga HIPPA yang tidak aktif. (4) Banyak permasalahan dalam pengelolaan irigasi antara petugas irigasi desa dengan petugas irigasi pemerintah.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan harapan dapat memberikan data yang valid. Untuk teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Setelah mendapat data dari informan, kemudian peneliti mengolah data dengan menggunakan teknik triangulasi data. Pada penelitian ini menggunakan teori kelembagaan yang dinilai mampu menganalisis berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian yang dilakukan di desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo terkait dengan Kelembagaan dalam pengelolaan irigasi terdapat lembaga-lembaga yang dianggap penting di dalamnya. Salah satunya adalah dengan terbentuknya organisasi HIPPA yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan juga Dinas Pengairan.

Upaya Dinas Pertanian dalam kaitannya dengan peningkatan produksi pangan selama ini bekerja sama dengan Dinas Pengairan, Bapeda, LSM, dan HIPPA. Dinas Pertanian berkontribusi berupa bantuan seperti bibit, pompa air, mesin dan sebagainya guna menunjang keberhasilan produksi pertanian.

Dinas Pengairan dalam hal pengelolaan irigasi tidak terlibat secara langsung dalam distribusi air pada petani. Dinas Pengairan hanya memantau air sampai di pintu sekunder. Selanjutnya pengendalian air irigasi di tingkat tersier berada di tangan organisasi HIPPA melalui *Ulu-ulu*.

HIPPA sebagai organisasi petani pemakai air irigasi 2(dua) tahun terakhir tidak berperan aktif dalam distribusi air mulai dari saluran tersier sampai ke petak sawah petani. Artinya organisasi HIPPA”Tirtosari”di desa Kesambirampak tersebut mengalami kemacetan. HIPPA yang seharusnya ikut mengontrol keluar masuknya air ke petak sawah petani, pada akhir-akhir ini tidak bekerja secara efektif sehingga menyebabkan distribusi air terganggu. Dalam beberapa hal HIPPA hanya ikut turun langsung jika mau ada bantuan. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya koordinasi dalam organisasi HIPPA sendiri, demikian juga dengan instansi lain yang terkait.

Dampak dari lemahnya kinerja organisasi HIPPA ataupun instansi lain yang terkait ditengah masyarakat menyebabkan terjadinya konflik perebutan air antara petani dengan petani, bahkan terjadi diantara petani dengan *Ulu-ulu*. Di sisi lain, kinerja *Ulu-ulu* menjadi sangat komersial, bahkan terjadi “politik uang” untuk mempercepat mendapatkan air.

**Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tata Kelola Irigasi Oleh HIPPA "Tirtosari" Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo*". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang sangat mendalam kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 2) Rektor Universitas Jember dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 3) Drs. Joko Mulyono, M.Si., selaku Ketua Program Studi Sosiologi yang telah memberikan pengarahan, wawasan, dan masukan berkaitan dengan penulisan skripsi ini ;
- 4) Dra. Elly Suhartini M.Si., selaku DPA yang selalu memberikan arahan bimbingan agar bisa terus menjadi lebih baik.
- 5) Segenap dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember telah memberikan pengarahan, wawasan, dan ilmu selama saya menjalani perkuliahan;
- 6) HIPPA "Tirtosari" dan Masyarakat Petani di Kesambirampak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini.
- 7) Kepada orang tua saya Bapak Nawatun dan Ibu Surahmah, serta keluarga besar saya yang selama ini yang selalu mendoakan dan memberi semangat, perhatian serta dukungan. Bakti ananda belum sebanding dengan keringat dan jerih payahmu

selama ini. Terimakasih telah menjadi embun dalam pagiku, menjadi payung dalam hujanku, terimakasih atas sayang dan perhatiannya.

- 8) Saudara-saudaraku Yu Ely, Yu Wiwik dan Yu vita yang selalu memotivasi terselesainya skripsi ini.
- 9) Keluarga Besar Bangka 03 No 24 (Nanda, Sinta, Sulis, Ayuni, Nopik, Vian, Sri)
- 10) Rekan-rekan mahasiswa Sosiologi angkatan '14 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas kebersamaannya selama ini.
- 11) Teman seperjuangan Sosiologi'14 terutama para coy (Novitasari, Karvelisa, Roni, Adi, dan Muslim).
- 12) Berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 28 Mei 2018

Penulis

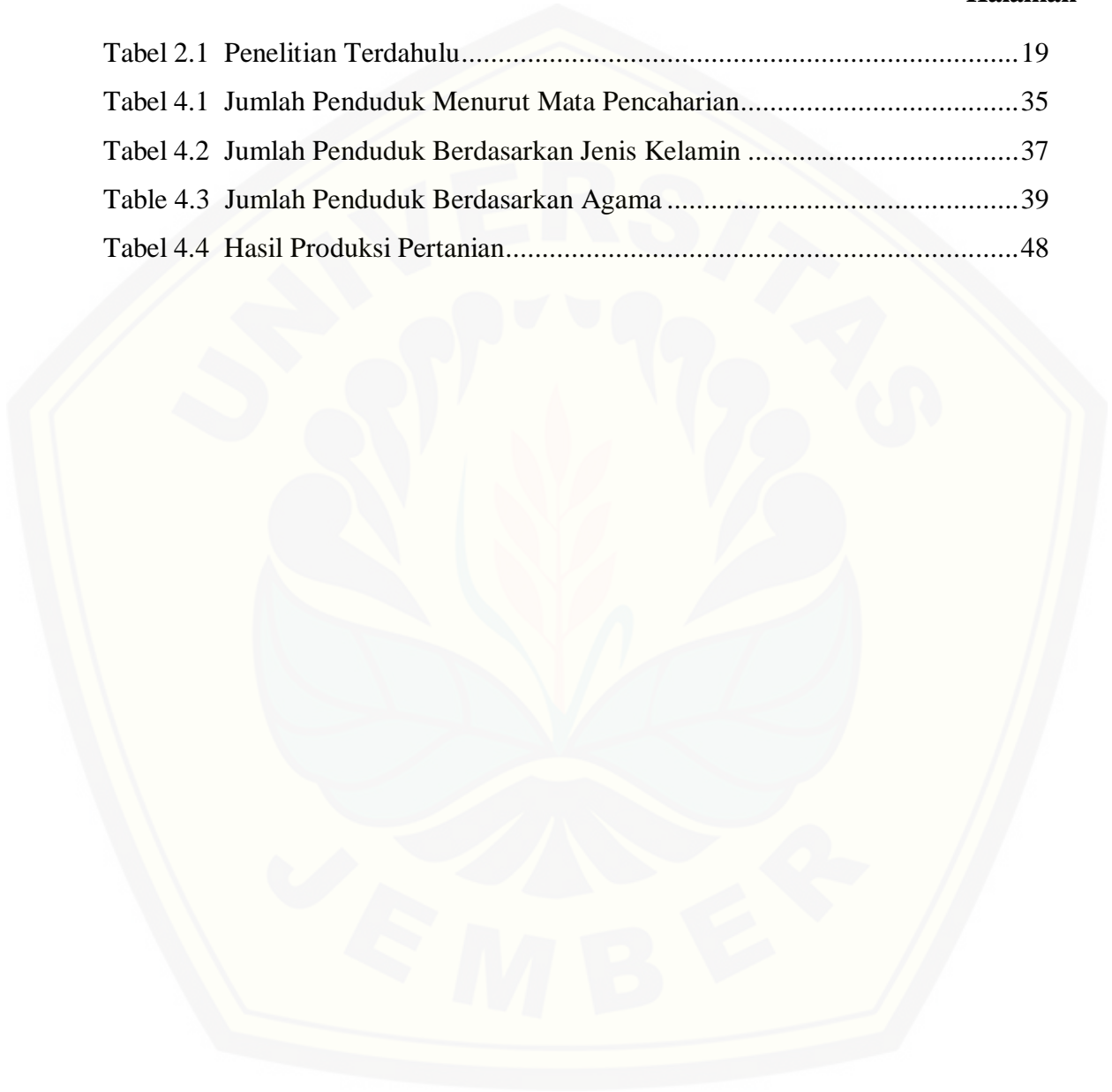
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Fokus Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Irigasi.....	8
2.3 Konsep Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga Sosial).....	10
2.3.1 Ciri- Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan	10
2.3.2 Tipe-Tipe Lembaga Kemasyarakatan	12
2.4 Petani dan Sejarah Pertanahan di Indonesia	13
2.5 Konsep Sistem Irigasi Berkelanjutan	14
2.6 Teori Kelembagaan (<i>Institutional Theory</i>)	16
2.7 Penelitian Sebelumnya yang Relevan.	18
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	23

3.3 Teknik Penentuan Informan	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Uji Keabsahan Data.....	27
3.6 Teknik Analisis Data	29
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo.....	32
4.2 Profil Kecamatan Kapongan.....	33
4.2.1 Gambaran Singkat Kecamatan Kapongan	33
4.2.2 Kondisi Geografis Desa Kesambirampak.....	34
4.2.3 Penduduk dan Mata Pencaharian	35
4.2.4 Keadaan Sosial Ekonomi.....	37
4.3 Terbentuknya Organisasi HIPPA”Tirtosari”Desa Kesambirampak.	40
4.4 Kondisi Pertanian di Kecamatan Kapongan.....	46
4.4.1 Jenis Komoditas yang Diusahakan.....	46
4.4.2 Potensi Unggulan	47
4.5 Kelembagaan Desa dalam Pengelolaan Irigasi.....	50
4.6 Tata Kelola Irigasi Yang Tidak Efektif	56
4.6.1 Kompromi dan Kompetisi	56
4.6.2 Politik Uang dalam Tata Kelola Irigasi	61
4.6.3 Konflik Perebutan Air	63
4.7 Peran IPAIR untuk Pemeliharaan Sarana Irigasi	71
4.8 Proses Penyelesaian Konflik yang Dilakukan Oleh HIPPA	81
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Table 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	39
Tabel 4.4 Hasil Produksi Pertanian.....	48

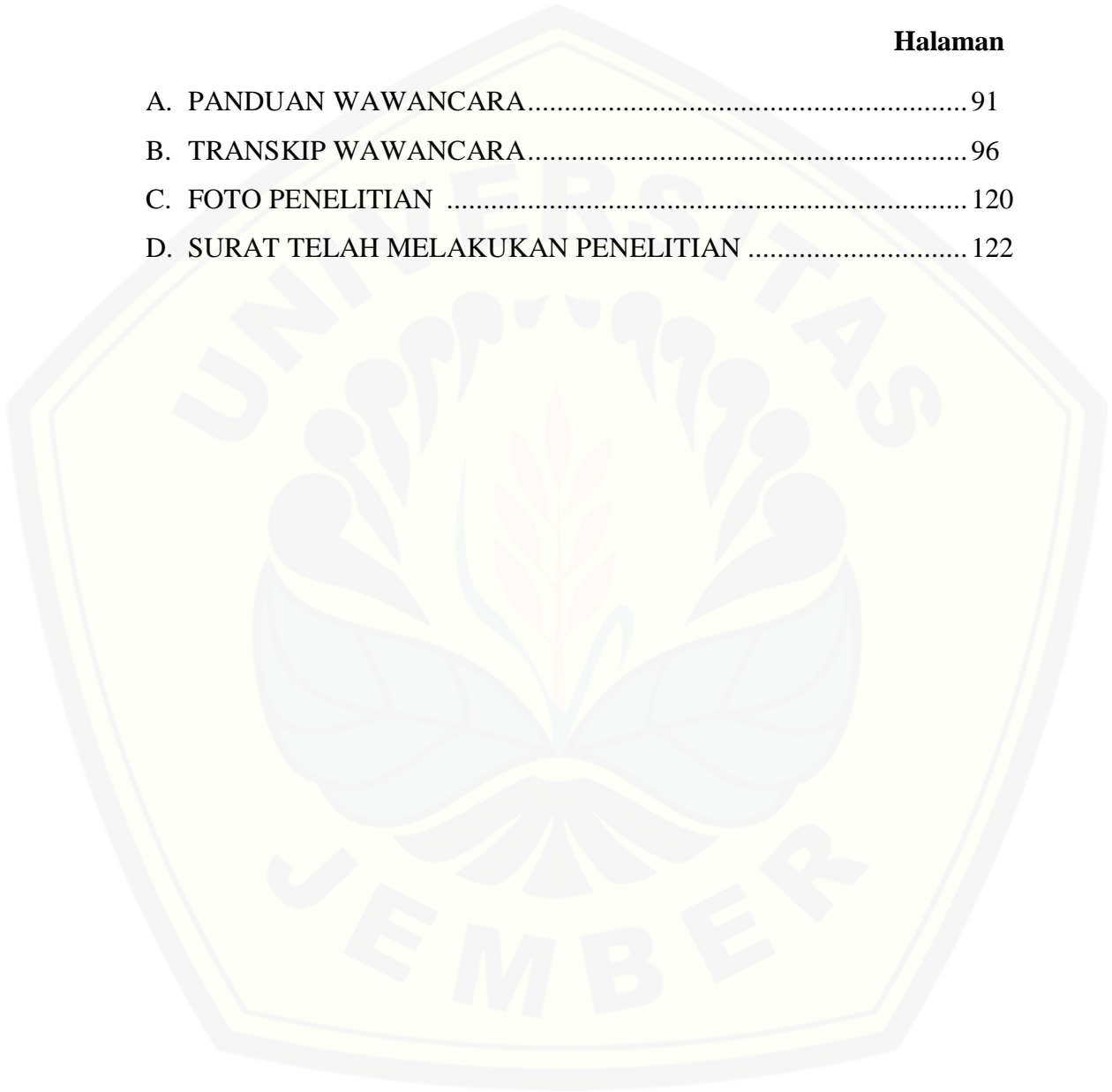


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Pembangunan Irigasi Berkelanjutan	16
Gambar 3.1 Proses Analisis Data	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi HIPPA.....	42
Gambar 4.2 Skema Pengelolaan Irigasi.....	69
Gambar 4.3 Skema Pembagian Air.....	70
Gambar 4.4 Skema Model Pengelolaan Irigasi	75
Gambar 4.5 Skema Model Pengelolaan Irigasi Lengkap.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. PANDUAN WAWANCARA.....	91
B. TRANSKIP WAWANCARA.....	96
C. FOTO PENELITIAN	120
D. SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	122



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan merupakan salah satu desa yang memberikan kontribusi terbesar dalam sector pertanian. Desa tersebut terbagi menjadi 7 dusun yaitu Krajan, Sarse, Nyior Cangka, Karang Malang, Karang Layar, Rambutan dan Pajuko'an. Produksi pertanian tanaman pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat diantaranya adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan lain-lain. Kondisi tanah di wilayah Kecamatan Kapongan sangat basah, sehingga banyak petani menanam tanaman padi (<http://desakapongan1.blogspot.com>)

Keberhasilan program ketahanan pangan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam produksi pertanian. Dalam hal ini, salah satu faktor teknis yang sangat mendukung dalam produktivitas pertanian adalah ketersediaan air irigasi yang baik dan sesuai kebutuhan tanaman. Air merupakan material yang penting dalam menjaga seluruh kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu untuk kebutuhan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Hal tersebut menjadikan air menjadi unsur penting dan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam produksi pertanian.

Ketersediaan air bagi petani merupakan faktor mutlak bagi petani. Sebab yang dibutuhkan oleh tanaman adalah air yang terdapat dalam tanah yang ditahan oleh butir-butir tanah dan tanaman akan sangat peka terhadap kekurangan air pada masa mudanya. Selama ini masyarakat petani menganggap air sebagai milik umum (*Public Goods*) sehingga dalam pemakaiannya tidak memerlukan biaya ataupun aturan-aturan khusus. Aturan yang berlaku atas fakta kebutuhan air dari masyarakat petani umumnya tidak dalam bentuk tertulis. Hal ini mengancam keberadaan irigasi desa, terutama dalam memperoleh hak memanfaatkan air.

Untuk mengatasi masalah tersebut kebijakan pengelolaan irigasi menjadi sangat penting.

Jika kita berbicara tentang irigasi desa, tentu tidak lepas dari peran Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, dan HIPPA. Pada awalnya pengelolaan irigasi desa dilakukan oleh petugas air yang sering disebut dengan *ulu-ulu* air yang bekerja sama dengan HIPPA. Secara struktural jika dilihat dalam pemerintahan desa posisi Ulu-Ulu dan HIPPA berada di bawah lembaga desa. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pemerintah melalui kebijakannya yaitu Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1982 tentang pengelolaan irigasi tersier yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan petani pemakai air. Dalam hal ini, pemerintah menganjurkan untuk pembentukan lembaga sebagai wadah bagi petani pemakai air dalam sebuah lembaga yang disebut *Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)*.

Perubahan mendasar dalam pengelolaan air yang dilakukan oleh P3A menjadi semakin besar peran dan kewenangannya dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 1999 yang isinya menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada P3A untuk mengelola irigasi pada saluran tersier. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan tersebut pemberdayaan P3A diupayakan untuk semakin meningkatnya partisipasi petani dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan saluran irigasi .

Kebijakan pengelolaan irigasi telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang irigasi yang diarahkan untuk memperbaiki kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi kebijakan pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendorong pengelolaan sistem irigasi yang handal dan mandiri melalui *Pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)* yang dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. PPSIP dikembangkan dengan meningkatkan partisipatif dari masyarakat pemakai air sendiri. Dalam hal ini para petani pemakai air membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). P3A atau HIPPA

merupakan kelembagaan lokal pengelola irigasi yang menjadi wadah petani dalam suatu pelayanan irigasi yang dibentuk oleh para petani secara demokratis. HIPPA dibentuk pada setiap desa yang fungsinya untuk menjalankan sebagai pengatur penggunaan air irigasi bagi kepentingan petani di wilayah tersebut.

Beberapa Kebijakan Pemerintah terkait Pengelolaan Irigasi yaitu PP No 23 Tahun 1982, Inpres No 3 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 20 Tahun 2006. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut tampaknya berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan air irigasi. Kebijakan tersebut sebagai pengatur pemanfaatan air serta melakukan pemberdayaan terhadap P3A dalam melakukan operasional dan pemeliharaan irigasi yang mandiri dan partisipatif. Sasaran pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif adalah wilayah kerja kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) atau gabungan HIPPA yang pengelolaan irigasinya (sistem irigasi) belum optimal, baik dari kondisi fisik jaringan, operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi di tingkat usaha tani.

Dengan demikian, semakin kompleksnya penggunaan Sumber Daya Air pada berbagai sector kehidupan sehari-hari dan juga pertanian, baik di daerah hulu, tengah, maupun daerah hilir menunjukkan bahwa air merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya peran dan kerja sama dengan Dinas Pengairan dan juga Dinas Pertanian untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi kepentingan masyarakat luas khususnya daerah Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Keterkaitan struktur organisasi masyarakat irigasi antara kelompok petugas pemerintah dengan kelompok petani pemakai air umumnya sangat lemah. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya sistem pengelolaan irigasi sangat lemah yaitu karena kurangnya koordinasi antara Dinas Pengairan dan petugas irigasi desa yang masih mementingkan kepentingan masing-masing. Selain itu, juga terjadi karena beberapa sebab, antara lain belum terpadunya pemahaman tujuan irigasi antara kelompok petugas irigasi pemerintah dan kelompok masyarakat petani

pemakai air. Bagi petugas irigasi pemerintah, tujuan irigasi adalah keberhasilan program pengadaan melalui usaha tani secara intensif. Dengan demikian kelompok petugas irigasi pemerintah menjadi penguasa air, bukan menjadi pemimpin yang bertindak sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah kekurangan atau kelebihan air yang dihadapi oleh kelompok masyarakat petani pemakai air.

Terkait dengan pembiayaan HIPPA masalah Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan O&P adalah adanya iuran air yang dibayarkan oleh petani. Melalui Inpres N0 3 Tahun 1999 yaitu pembiayaan pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab HIPPA yang pembiayaannya melalui Pungutan Iuran Pengelolaan Air (IPAIR). Berdasarkan Inpres tersebut, Pengelolaan IPAIR sepenuhnya dikelola oleh HIPPA. Tujuan IPAIR adalah untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh atas biaya Operasional dan Pemeliharaan (OP) dari sistem jaringan irigasi. Jaringan irigasi dan pembuang di Bidang Pengairan Kabupaten Situbondo yaitu jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier, dan jaringan pembuang.

Dalam sistem pengelolaan irigasi terdapat lembaga-lembaga yang dianggap penting untuk mengembangkan dan menyesuaikan kegiatan terhadap perubahan unsur-unsur kelembagaan. Lembaga tersebut meliputi Dinas Pengairan, Dinas Pertanian dan HIPPA.

Dari hasil observasi awal pada tanggal 12 Mei 2017, terdapat fenomena dalam pengelolaan irigasi yaitu, *Pertama*, Lembaga Pemerintah (Dinas Pengairan) tidak menangani secara langsung dalam distribusi air kepada petani. Dinas Pengairan hanya memantau datangnya air yang berada di pintu 2 (Pintu Gungseng) yang ada di Tokelan. Hal tersebut juga diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Misnadin (Ulu-ulu Karang Malang) ” *Selama deddi Pangolo Benyo Gerua Dinas Pengairan Tak rok-nurok. sanonto mantre ben HIPPA pas tadek tak akongsi. Jek mantre-mantre tadek , perak anyama nenggu e labeng. Bule aberrik pesse ka mantre. jek adentek nih peleng enten 50*”. (Selama saya jadi Ulu-Ulu Air Dinas Pengairan tidak ikut berperan langsung dalam alokasi air. Sekarang ini, Mantri Pengairan dan HIPPA tidak bekerja sama lagi. Mantri dari Dinas Pengairan cuma

sekedar melihat jalannya air. Justru Bapak Misnadin memberi uang sebanyak 50 ribu untuk mantri yang datang melihat di pintu 2 (pintu gungseng) . Berdasarkan pernyataan ini menjadi jelas bahwa pengelolaan irigasi setelah masuk pada saluran tersier sudah menjadi tanggung jawab HIPPA dan *Ulu-ulu*. Artinya kelembagaan HIPPA ini menjadi sangat penting dalam distribusi air irigasi. Apabila lembaga ini tidak berfungsi dengan baik maka akan mengganggu sistem pembagian air di tingkat petani. Artinya distribusi air di sawah-sawah petani menjadi terganggu karena yang terjadi di lapangan pembagian air menjadi transaksi awal

Kedua, HIPPA yang merupakan lembaga dari desa sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini diperkuat dengan jawaban Bapak Misnadin”. *Ketua HIPPA mengundurkan diri pon. tape sanonto Pakna Desi (Bendahara HIPPA) tak ebegi mundur bik patenggina. HIPPA na tak akongsi bik masyarakat tani. Kaberre mabedee pamelean pole. Kan pon bejena agente 5 taon. Tadek Hj.amir rang-rang toron mon bede masalah . Enggi bule penyettor an paggun tekkak HIPPA na mara gerua* (Ketua HIPPA sudah mengundurkan diri. Akan tetapi Bapak Desi selaku bendahara HIPPA tidak diperbolehkan berhenti oleh Kepala Desa.HIPPA tidak bekerja sama dengan masyarakat petani. Kabar nya, akan mengadakan pemilihan Ketua HIPPA lagi. Karena sudah waktunya berganti masa jabatan 5 tahun.Tidak, Hj.Amir jarang turun jika ada masalah .Ya saya setoran tetap bayar walaupun keadaan HIPPA nya seperti itu .

Berdasarkan beberapa fakta yang telah diungkapkan di atas, maka sistem tata kelola irigasi distribusi air menjadi terganggu. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya yaitu distribusi air tidak berjalan secara adil, sehingga sering terjadi konflik antar petani karena berebut air. Konflik tersebut diantaranya yaitu karena banyak petani yang tidak mendapat jatah air sesuai dengan jatahnya ,seperti apa yang diungkapkan oleh Sam (petani) bahwa ia pada saat mengairi sawahnya, tiba-tiba air yang masuk ke sawah miliknya menjadi kecil karena ada petani dibagian depan yang *nambek* (membendung) dengan *gedebbhung* (Pelepah

Pisang) sehingga menyebabkan terjadinya perang mulut diantara pak Sam dengan petani lainnya. Terjadinya konflik antar petani dan perebutan air di sawah menunjukkan bahwa tata kelola irigasi di desa Kesambirampak sangat rawan. Hal tersebut disebabkan karena tidak berfungsinya HIPPA dan lemahnya koordinasi diantara para elite tingkat petani maupun instansi terkait.

Dengan beberapa fakta empiris tersebut di atas maka menjadi masalah yang cukup menarik untuk diteliti. Hal ini juga menunjukkan bahwa begitu pentingnya masalah dalam pengelolaan irigasi terhadap kebutuhan pertanian. Dari yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang problematika “*Tata Kelola Irigasi Oleh HIPPA “Tirtosari” Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo*”.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang irigasi adalah dengan diserahkannya pengelolaan irigasi kepada desa melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian. Dalam pengelolaan irigasi yang baik tidak lepas dari peran dan upaya masyarakat atau petani dalam setiap tahap kegiatannya, termasuk juga dalam mendorong terbentuknya organisasi HIPPA yang demokratis dan mandiri.

Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, baik itu berupa kesiapan dari masyarakat maupun pelaksana teknis yang dilakukan oleh HIPPA . Lemahnya koordinasi antara bagian dalam organisasi HIPPA maka menyebabkan mengalami disfungsi.

Berdasarkan kondisi yang dikemukakan di atas peneliti dapat mengambil suatu persoalan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah yang akan menjadi acuan pokok dalam penelitian ini, yaitu “*Bagaimana Tata Kelola Irigasi Oleh HIPPA*

“Tirtosari” Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?”

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka Penelitian ini difokuskan pada Tata Kelola Irigasi Oleh HIPPA “Tirtosari” di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Menganalisa dan mendeskripsikan Tata Kelola Irigasi oleh HIPPA “Tirtosari” Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Sebagai sarana dalam aplikasi ilmu pengetahuan khususnya di bidang sosiologi pertanian untuk mengembangkan pikiran mengenai tata kelola irigasi pertanian.
- 2) Sebagai bahan referensi dan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta tambahan informasi bagi pihak yang berkaitan dengan penelitian tentang topik yang sama.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo supaya pemerintah lebih memperhatikan lembaga-lembaga dalam pengelolaan irigasi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Irigasi

Pengertian irigasi secara umum yaitu pemberian air kepada tanah dengan maksud untuk memasok langsung esensial bagi pertumbuhan tanaman (Hansen, dkk, dalam Pusposutardjo : 2001). Tujuan umum irigasi kemudian dirinci lebih lanjut, yaitu;

- a. Menjamin keberhasilan produksi tanaman dalam menghadapi kekeringan jangka pendek (dalam bahasa Jawa disebut *bethatan*).
- b. Mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga akrab untuk pertumbuhan tanaman.
- c. Mengurangi bahaya kekeringan.
- d. Mencuci atau melarutkan garam dalam tanah.
- e. Mengurangi bahaya pemipaan tanah.
- f. Melunakkan lapisan olah dan gumpalan tanah.
- g. Menunda pertunasan dengan cara pendinginan lewat evaporasi.

Tujuan umum irigasi tersebut secara implisit mencakup pula kegiatan drainase pertanian, terutama yang berkaitan dengan tujuan mencuci dan melarutkan garam dalam tanah. Tujuan utama irigasi yang disebutkan tentu saja tidak semuanya berlaku untuk di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terletak di kawasan muson tropis-basah.

Pengertian irigasi, bangunan irigasi, daerah irigasi, dan petak irigasi telah dibakukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/1982 Ps. 1. Kutipan dari pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

- b. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
- c. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat satu jaringan irigasi.
- d. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi. (Pusposutardjo, Suprodjo : 2001)

Dengan demikian , maka keberadaan irigasi menjadi sangat penting bagi petani. Terlebih pada para petani yang memakai sistem padi sawah maka keberadaan irigasi menjadi sangat penting.

2.2 Konsep Program Pembangunan Irigasi

Strategi untuk mendukung pencapaian target yang melalui proses pembangunan irigasi yang cepat menghasilkan (*quick yielding*) melalui program program-program dengan prioritas berikut(Suzanne,1996:06)

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Program ini relatif memerlukan waktu yang lebih pendek dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pembangunan jaringan baru. Karena itu program rehabilitasi ini mendapat prioritas lebih tinggi daripada program yang lain.

2. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru

Dengan Pembangunan Jaringan Irigasi baru,lahan pertanian beririgasi dapat diperluas(ekstensifikasi). Dalam rangka *quick yielding*,maka dalam program pembangunan jaringan irigasi baru ini diperkenalkan pula pembangunan jaringan irigasi sederhana yakni jaringan irigasi dengan ukuran kecil dan teknologi sederhana.Prinsip dasarnya adalah membawa air dari sumbernya ke tempat pemanfaatan dengan cara yang sesederhana mungkin,cepat berfungsi dan murah biayanya.

3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan(O & P) Jaringan Irigasi

Dengan program ini dimaksudkan agar dapat dicapai tingkat kinerja jaringan irigasi yang optimal dan berkelanjutan(*sustainable*).

2.3 Konsep Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga Sosial)

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Ada yang mempergunakan istilah *pranata-sosial*, tetapi *social-institution* menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Koentjaraningrat (1990: 113) mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus di dalam masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Mac Iver dan Charles H. Page mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi. Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya. Lembaga kemasyarakatan diartikannya sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

2.3.1 Ciri- Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan

Gillin (dalam Soekanto ,2012 :67) dalam karyanya yang berjudul *General Features of Social Institutions*, mengatakan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata

kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam suatu unit yang fungsional.

- b. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan cirri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan, apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. Perbedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat yang bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata-tertib yang berlaku dan lain-lain.

Dalam kaitannya tata kelola irigasi sebagai lembaga, baik itu lembaga dari pemerintah atau lembaga dari desa menjadi sangat penting. Maka Keberadaan lembaga sosial seperti Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, dan HIPPA menjadi sebuah lembaga yang keberadaannya perlu dikembangkan, terlebih lagi apabila terjadi tidak berfungsinya lembaga sosial yang seharusnya mengelola distribusi air.

2.3.2 Tipe-Tipe Lembaga Kemasyarakatan

Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Menurut Gillin (dalam Soekanto, 2012:67) lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Crescive institutions* dan *enacted institutions* yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Crescive institutions* yang juga disebut lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat.
- b. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *Basic Institution* dan *Subsidiary Institution*. *Basic Institution* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
- c. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *social sanctioned-institutions* dengan *unsanctioned institutions*. *Approved* atau *social sanctioned-institutions*, adalah lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang dan lain-lain . Sebaliknya *unsanctioned institutions* adalah yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya.
- d. Perbedaan antara *general institutions* dengan *restricted institutions*, timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya.
- e. Sudut fungsinya terdapat perbedaan *operative institutions* dan *regulative institution*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya lembaga industrialisasi.

Dengan demikian, tipe-tipe lembaga dalam tata kelola irigasi ini jika dilihat dari beberapa tipenya, maka lembaga dalam tata kelola irigasi termasuk dalam tipe lembaga berdasarkan sudut fungsinya. Dimana lembaga dalam tata kelola irigasi di desa Kesambirampak, Dinas Pengairan dan HIPPA sudah mengalami pergeseran di dalam masyarakat. Artinya dalam hal ini lembaga HIPPA

jika dikaitkan dengan fenomena penelitian termasuk dalam tipe lembaga berdasarkan sudut fungsinya.

2.4 Petani dan Sejarah Pertanahan di Indonesia

Yuswadi (2005:1) mengatakan sebuah fenomena tentang petani pada umumnya terkait dengan banyaknya kesenjangan yang terjadi dalam proses bertani, terutama antara petani pemilik tanah dengan petani buruh yang tidak memiliki tanah. Menurut Wolf (dalam Yuswadi 2005 :2), petani (*peasant*) adalah orang-orang desa yang bercocok tanam di pedesaan; mereka berbeda dari pengusaha pertanian (*farmer*) yang mengelola usaha tani sebagai sebuah perusahaan bisnis.

Yuswadi (2005: 1-2) juga mengemukakan studi tentang petani di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Amaluddin, petani juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain:

- a. *Petani menengah dan besar* , yakni rumah tangga petani yang menguasai tanah pertanian seluas $> 0,50$ ha.
- b. *Petani kecil*, yakni rumah tangga yang menguasai tanah pertanian seluas 0,25-0,49 ha.
- c. *Petani gurem*, yakni rumah tangga petani yang menguasai tanah pertanian seluas antara 0,01-0,24 ha.
- d. *Tunakisma buruh tani*, yakni rumah tangga bukan pemilik tanah yang bekerja sebagai buruh upahan dalam proses produksi pertanian dan tidak menguasai tanah pertanian (Yuswadi, 2005: 1-2).

Berdasarkan pembagian tingkatan petani seperti dikemukakan di atas, tampaknya pola struktur petani di Indonesia masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Hal tersebut disebabkan oleh ketimpangan antara luas tanah dengan jumlah petani yang sangat besar dan dipengaruhi oleh fragmentasi tanah akibat jual-beli serta sistem pewarisan tradisional yang bersifat khas (Rahman,1996). Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya produksi subsistensi dikalangan petani dan bahkan terjadi apa yang digambarkan oleh Geertz sebagai “*Involusi Pertanian*”(Geertz,1983). Sedangkan Scott (1976: 13) mengatakan bahwa keluarga petani yang harus hidup dari:

Hasil lahan yang sempit didaerah yang terlalu padat penduduknya akan bekerja keras dalam waktu yang lama agar dapat memperoleh tambahan penghasilan. Chayanov menyebut gejala tersebut sebagai *self-exploitation* atau *swa pacal* (Yuswadi, 2005: 2).

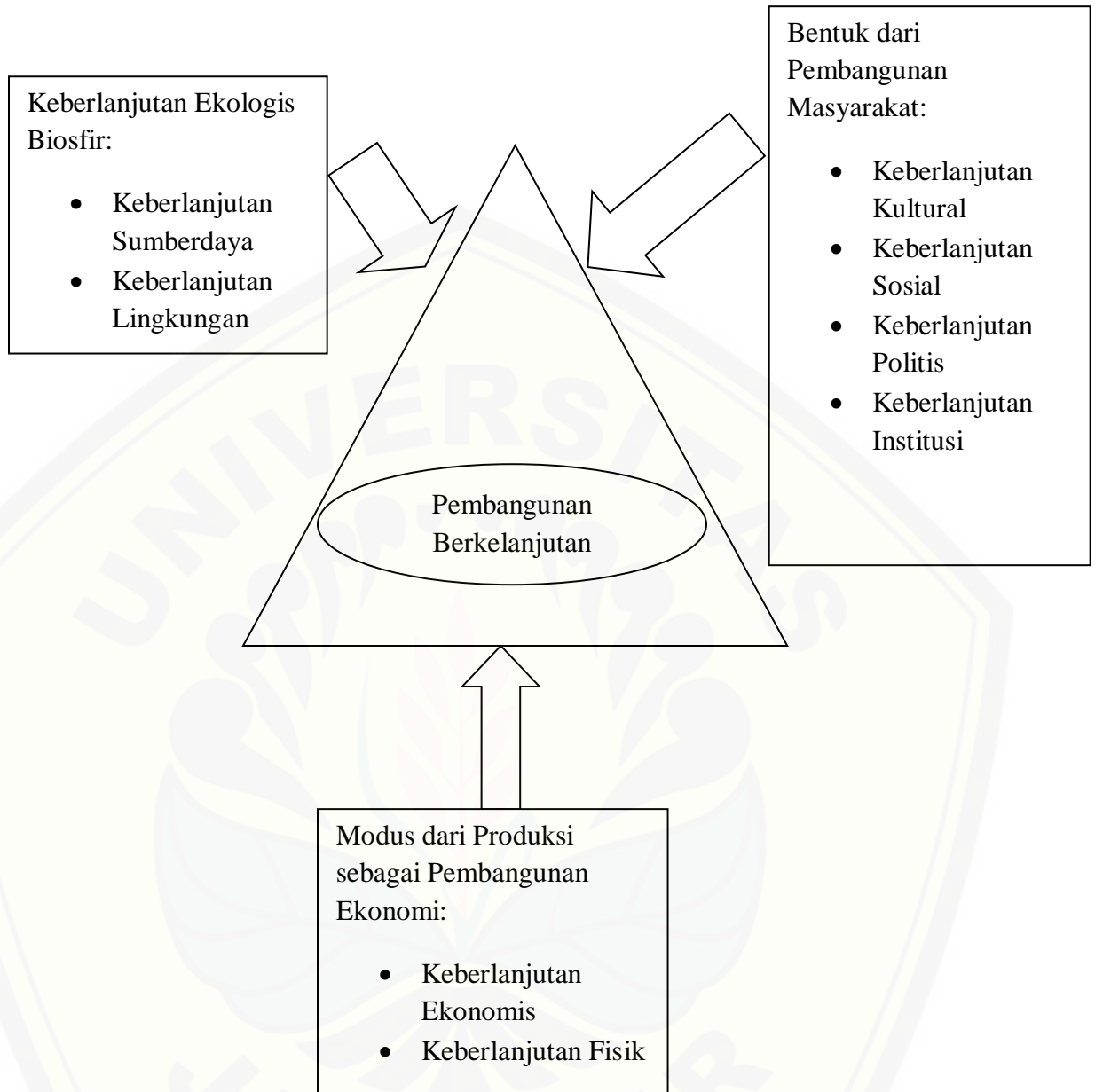
Jika hal tersebut dikaitkan dengan penelitian yang ada di Kesambirampak maka petani tersebut termasuk sama dalam ke 4 tingkatan petani yang sudah dijelaskan pada penjelasan di atas. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan ,masyarakat setempat tidak hanya termasuk dalam petani pemilik saja, tetapi ada juga masyarakat yang termasuk dalam tingkatan petani Tunakisma Buruh Tani.

2.5 Konsep Sistem Irigasi Berkelanjutan

Burger dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (2001:49) merangkum dan merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan dalam bentuk sederhana, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Bentuk rumusan tersebut adalah : Pembangunan berkelanjutan = Pembangunan Sosial dan Ekonomi+Keberlanjutan Ekologis. Rumusan pembangunan keberlanjutan tersebut, kemudian diuraikan dalam tiga dimensi (*dimensions*) yaitu dimensi biosfir, dimensi masyarakat dan dimensi modus produksi.

Kalau rumusan pembangunan berkelanjutan dipakai untuk mempermudah pemahaman konsep pembangunan irigasi berkelanjutan, maka bentuk hubungan antara pengembangan irigasi berkelanjutan dengan pembangunan berkelanjutan dapat ditunjukkan dalam kerangka gambar berikut. Konsep Burger dalam pembangunan berkelanjutan menganut asas:

- a. Efisiensi.
- b. Kecukupan.
- c. Konsistensi keserasian dari elemen-elemen pembangunan.
- d. Kewaspadaan



Gambar 2.1 : Konsep Pembangunan Irigasi berkelanjutan dalam cakupan pembangunan berkelanjutan (Burger, 1997)

Artinya sistem irigasi berkelanjutan yang ada di Kesambirampak dapat dilihat dengan adanya terbentuknya HIPPA sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah dari petani berfungsi sebagai agen perubahan dalam struktur kelembagaan desa yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan atas air bagi petani di desa Kesambirampak.

2.6 Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Dalam Syahuti,dkk (2014:07) yang membahas tentang teori kelembagaan yang dipopulerkan oleh pemikiran Scott (2008) sebagaimana mengatakan lembaga sebagai “*are comprised of regulative,normative and cultural-cognitive elements that,together with associated activities and resources,provide stability and meaning to social life*”.

Lembaga dapat dirumuskan sebagai hal yang berisi norma, regulasi, dan kultural kognitif yang menyediakan pedoman, sumber daya, serta sekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor. Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan (*order*) dalam masyarakat,meskipun lembaga tersebut dapat berubah. Demikian pula untuk petani, lembaga memberikan pedoman bagi petani dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari khususnya dalam bidang agribisnis untuk bertindak sebagaimana dipahaminya(kultural-kognitif).

Hal tersebut juga dibuktikan pernyataan Norman Uphoff (1986) dalam Syahyuti (2015:86) yang menyatakan “Kelembagaan”. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum,dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga.Norman Uphoff (1992) dalam Syahyuti (2015:87) menjelaskan tujuan akhir adalah organisasi yang melembaga,atau kelembagaan yang memiliki aspek organisasi. Jadi,mereka hanya berbeda dalam tingkat penerimaan di masyarakat saja. “Kelembagaan” mengandung dua aspek. Aspek yang dimaksud yakni “aspek cultural” (aspek kelembagaan) dan “aspek struktural” (aspek keorganisasian). Aspek cultural terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan jiwa suatu kelembagaan yaitu nilai, norma, dan aturan. Sementara aspek structural berupa sesuatu yang lebih visual dan statis yaitu struktur, penerapan peran, tujuan, keanggotaan dan lain-lain.

Kedua aspek ini secara bersama-sama membentuk dan menentukan perilaku seluruh orang dalam kelembagaan tersebut. Keduanya merupakan komponen pokok yang selalu *exist* dalam setiap kelompok sosial(Syahyuti,2015:87)..Artinya jika

teori tersebut jika dikaitkan dengan fenomena yang ada di Kesambirampak, aturan HIPPA yang seharusnya menjadi lembaga desa sekaligus wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi dalam realitanya dilapangan lembaga tersebut tidak menangani secara langsung jika terjadi permasalahan air. HIPPA sudah tidak lagi berjalan efektif. Didalam kepengurusan HIPPA tidak ada koordinasi yang baik antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lainnya. Secara struktural HIPPA sebagai organisasi petani pemakai air tidak bekerja seperti halnya sebuah organisasi yang mempersatukan petani, memenuhi distribusi air serta tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya organisasi.

Secara kultural lembaga ini sudah berubah fungsi. HIPPA yang harusnya jadi milik masyarakat saat ini sudah terputus antara hubungan petani dengan petugas HIPPA yang bersangkutan. Realitanya petugas irigasi pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai fasilitator dalam alokasi sumber daya air, justru bertindak sebagai penguasa air. Dimana mantri-mantri yang bertugas memantau air, khususnya yang berada di pintu 2 yang lokasinya di desa Tokelan, para mantri menerima uang dari sub-blok sebagai upaya untuk mempermudah mendistribusikan air.

Perbedaan Kepentingan diantara petugas irigasi desadenganpetugas pemerintah inilah menyebabkan terjadinya konflik atas sumber daya air. Tidak hanya berhenti disini, konflik pengguna air irigasi kerap terjadi diantara petani dan petani, bahkan juga petani dengan tukang turap (*Ulu-ulu*). Hal tersebut disebabkan karena kurangnya koordinasi sehingga menyebabkan pengelolaan sumber daya air kurang maksimal.

Di desa Kesambirampak para petani ketika mau membajak sawah sampai dengan menanam padi atau masyarakat setempat yang menyebutnya dengan istilah "*manjek*" cara petani untuk mendapatkan air ada yang lapor terlebih dahulu dan ada juga yang tidak lapor. Artinya dalam hal ini, sebagian dari petani di desa tersebut ada yang mendapatkan air tanpa laporan kepada *Ulu-ulu*. Ketika laporan pada *Ulu-ulu* para petani memberi "uang insentif" atau "uang rokok" sebagai upaya untuk mempermudah mendapatkan air agar air tidak diganggu oleh petani lainnya.

Para petani di desa tersebut menghalalkan segala cara untuk mendapatkan air. Sehingga menyebabkan hubungan dikalangan petani dengan petani, bahkan petani dengan tukang turap menjadi tidak harmonis. Hal tersebut disebabkan karena dari kalangan petani dan petugas irigasi desa mementingkan egosentris. Padahal kerukunan antar petani itu sendiri sangat penting.

Teori Kelembagaan ini diyakini oleh penulis bisa membuka dan sebagai alat membedah dan menganalisis sistem lembaga yang ada di Kesambirampak dalam mengelola irigasi pertanian melalui HIPPA, Dinas Pengairan, dan Dinas Pertanian. Keterkaitan antara dinas-dinas yang ada dalam pengelolaan irigasi yakni dalam teori ini disebut Institution yang berisi pengetahuan dan sistem yang bisa dipengaruhi. Teori yang digunakan ini digunakan untuk membedah masalah-masalah fenomena sosial terkait permasalahan yang akan dipecahkan dari tema tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam hal ini HIPPA merupakan sebuah kelembagaan yang ada di tengah masyarakat. HIPPA merupakan komponen penting dalam menunjang pembangunan pertanian yang dibentuk untuk berbagai kebutuhan. Guna mengaktifkan kembali HIPPA yang mengalami kemacetan, maka norma, regulasi, dan kultural-kognitif merupakan unsur satu konsep pilar yang benar-benar memudahkan pencapaian tujuan dalam suatu kelembagaan. Apakah lembaga tersebut supaya hidup kembali keaktifannya ditingkatkan, strukturnya dibenahi, atau Re-organisasi.

2.7 Penelitian Sebelumnya yang Relevan.

Di dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Jayanti, (2006) Skripsi” Konflik Antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”. Air Irigasi menjadi hal yang paling krusial di bidang pertanian, untuk itulah petani sangat rentan jika terjadi pengurangan distribusi air, karena kebutuhan akan air khususnya

distribusi air yang kian menipis tersebut, akan mengurangi debit air yang dialirkan ke petak sawah petani. Menurut peneliti implementasi terjadinya konflik berawal dari masuknya warga luar daerah untuk memiliki lahan pertanian di desa. Hal ini disebabkan karena hasil produksi dan ketersediaan air yang bagus. Konflik perebutan air irigasi antar petani disebabkan oleh faktor-faktor kepentingan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mirza Ferystiawan (2010) Skripsi” Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani di Asembagus Situbondo”. Terkait Intervensi Penyuluh Pertanian dalam Upaya Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gapoktan yang diketahui menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik kunjungan, demonstrasi, studi banding, dan evaluasi. Dari beberapa teknik tersebut menghasilkan setidaknya 3 perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada para petani, antara lain pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan di desa Kesambirampak , peneliti lebih meninjau tentang bagaimana sistem kelembagaan pengelolaan irigasi yang erat kaitannya dengan hubungan antara HIPPA, Dinas Pengairan, dan Dinas Pertanian. Peneliti mencoba mengambil sebuah cara pandang tentang bagaimana penelitian yang akan diteliti tersebut bisa mencakup pada ranah yang lebih luas.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Temuan Penelitian
Nur Jayanti (2006)	Konflik Antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian Di Desa Wongsorejo Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini melihat Konflik perebutan air irigasi antar petani

	Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi	<p>disebabkan oleh faktor-faktor kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementasi terjadinya konflik berawal dari masuknya warga luar daerah untuk memiliki lahan pertanian di desa wongsorejo.• Penelitian ini menggunakan teori konflik versi Dahrendorf.
Mirza Ferystiawan (2010)	Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus Situbondo	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian ini melihat penyuluh pertanian sebagai <i>community worker</i>.• Fokus penelitian yang diambil adalah keseluruhan Gapoktan yang ada di Kecamatan Asemabagus.• Teori Pertama

		<p>yaitu perubahan sosial tentang agen perubahan yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu (1990).</p> <ul style="list-style-type: none">• Teori kedua adalah teori modal sosial dari Pierre Bourdieu (1990) dan James S.Coleman (2010).
Ernawati (2014)	<p>Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Pertanian Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sampel yang diambil akan mencakup keseluruhan terkait dengan lembaga-lembaga dalam pengelolaan irigasi, baik itu merupakan lembaga pemerintah ataupun lembaga desa. sehingga data yang

		<p>diperoleh lebih lengkap .</p> <ul style="list-style-type: none">• Penelitian ini menghasilkan bahwasanya dalam pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh masyarakat Kesambirampak tidak berjalan secara optimal.• Dalam tata kelola sumber daya air, terjadi Kompromi dan Kompetisi.• Teori yang digunakan yaitu Teori Kelembagaan yang dicetuskan oleh Scot dan Norman Uphoff dalam Syahyuti.
--	--	---

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode merupakan aspek yang penting dalam penelitian dan memiliki pengaruh besar terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian adalah keutamaan dalam penelitian. Desain penelitian merupakan bentuk pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan “Tata Kelola Irigasi Oleh HIPPA” Tirtosari “Di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo”.

Menurut (Cresswell,2016:14) Metode Kualitatif bisa diartikan sajian dari temuan-temuan secara sengaja. Di mana nantinya dari temuan tersebut sesuai dengan kriteria yang dikembangkan akan dijadikan bahan analisis data. Data tersebut diharapkan dapat memberikan data yang valid.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana akan melakukan penelitian dan tempat informasi penelitian didapat untuk menjawab masalah-masalah sosial yang ada. Peneliti sebagai instrumen penelitian harus mengetahui kondisi lokasi tersebut. Hal ini digunakan untuk mempermudah bagi peneliti untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan alasan sebagai berikut:

- a. Desa Kesambirampak merupakan salah satu desa yang paling banyak luas baku sawah dan merupakan sawah teknis yang ada di Kabupaten Situbondo.

- b. Desa Kesambirampak mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.
- c. Desa Kesambirampak terdapat lembaga HIPPA yang sudah tidak aktif
- d. Banyaknya permasalahan dalam pengelolaan irigasi antara petugas irigasi desa dengan petugas irigasi pemerintah.

Sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari para petani yang masih kurang. Dengan adanya fenomena yang ditemukan dilapangan tersebut, membuat peneliti semakin tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana lembaga-lembaga dalam pengelolaan irigasi mengatasi permasalahan ini. Observasi dan wawancara dilakukan selama skripsi ini dilakukan dan diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu pada pertengahan bulan Oktober sampai dengan selesai.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive yaitu peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memilih informan yang tepat. Beberapa pertimbangan dalam penentuan informan ini antara lain:

1. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang benar menguasai persoalan yang sedang diteliti.
2. Informan tersebut adalah para petani yang mempunyai pengalaman terkait dengan masalah penelitian.
3. Informan tersebut terlibat secara langsung dalam persoalan yang terkait dengan tata kelola irigasi pertanian.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan dengan teori yang di gunakan oleh peneliti. Seperti HIPPA yang merupakan lembaga dari desa sudah mengalami kemacetan. Selain itu juga, terjadi kompromi dan kompetisi diantara petani dan ulu-ulu.

Penggunaan teknik *purposive* dalam penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi secara mendalam dan akurat dengan informan yang sengaja dipilih, yang diperkirakan mempunyai kemampuan untuk menjelaskan tentang masalah dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitian. Kriteria atau ciri-ciri yang dipilih dalam menentukan informan ini adalah:

- a) Dinas Pengairan UPTD Kecamatan Panji
 1. Nama : Robi
Sebagai : Kepala Dinas Pengairan UPTD Panji
 2. Nama : Mathari
Sebagai: Juru Pengairan Kesambirampak Utara Sungai
 3. Nama : Rejo
Sebagai: Juru Pengairan Kesambirampak Selatan Sungai
- b) Pengurus HIPPA Tirtosari
 1. Nama : Samsul
Sebagai: Ketua HIPPA baru Periode 2017
 2. Nama: Duhram
Sebagai: Ketua Sub-Blok
 3. Nama : Misnadin
Sebagai: Ketua Sub-Blok
- c) Dinas Pertanian
 1. Nama : Hendro
Sebagai: Seksi Prasarana Pertanian Bidang Tanaman Pangan
- d) Petani daerah Kesambirampak
 1. Nama : Samsuri
 2. Nama : Rohaedi
 3. Nama : Nono
 4. Nama : Supandi

5. Nama : Agus

Sedangkan untuk informan tambahan adalah:

1. Sn (Sahawatun)
2. Dk (Didik)
3. Ed (Edi)
4. Dr (Dar)
5. As (Agus)
6. Mawardi
7. Sucipto

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan untuk menunjukkan data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dimana pengumpulan data meliputi usaha peneliti untuk membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta merekam atau menacatat informasi (Cresswell, 2016: 253). Sehingga akan memudahkan peneliti untuk menentukan masalah-masalah yang sesuai dengan judul penelitian. Dikarenakan peneliti memilih dengan sengaja dan penuh perencanaan yang nantinya akan dapat mudah memahami masalah yang ada dilapangan. Peneliti akan berhenti jika data yang sudah didapatkan berada pada kejenuhan data. Sehingga peneliti akan berhenti ketika semua data sudah terpenuhi dan nantinya akan mencetuskan gagasan baru atau penemuan baru (Charmas dalam Cresswell, 2016: 254). Maka data yang akan dilakukan peneliti ada tiga tahapan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan langkah awal penelitian. Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh lebih banyak keterangan dari masalah yang akan

diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Observasi ini difokuskan pada mekanisme kerja HIPPA Tirtosari dan Masyarakat Petani dalam pengelolaan irigasi pertanian di Desa Kesambirampak.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data di lapangan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam (*dept interview*), *face to face interview*. Proses wawancara yang dimulai tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan berakhirnya penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, garis besar pokok rumusan masalah yang akan ditanyakan kepada informan untuk menjaga agar pokok-pokok rumusan masalah yang akan ditanyakan kepada informan dapat tercukupi. Peneliti melakukan wawancara dengan 12 informan yang kemudian hasil wawancara di tulis didalam transkrip wawancara.

c. Dokumentasi

Di dalam penelitian, dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting. Dokumentasi memiliki fungsi untuk mendokumentasikan bukti-bukti penelitian yang kita lakukan dari awal hingga akhir berupa gambar, rekaman, maupun tulisan. Dengan dokumentasi fakta yang ada di lapangan kita perlihatkan. Dokumentasi bisa dilakukan dengan alat bantu kamera atau *handphone* untuk alat perekam.

3.5 Uji Keabsahan Data

Cresswell dan Miller (2000) , mengatakan validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif didasarkan pada penentuan apakah temuan yang di dapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca (Creeswell, 2016: 269). Menguji keabsahan data pada suatu penelitian bertujuan agar data dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data agar dalam menarik kesimpulan tidak terjadi

kesalahan. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data.

Triangulasi (*Triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakan untuk membangun kebenaran dan kelengkapan data. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat mendapat validitas penelitian (Cresswell, 2016: 269). Adapaun langkah-langkah Triangulasi:

1. Membandingkan data observasi yang telah dilakukan sebelumnya, artinya hasil data observasi yang berbeda diolah kembali kebenarannya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi sejak awal sampai berakhirnya penelitian. Karena jarak lokasi penelitian yang tidak jauh, maka hampir setiap minggu peneliti mengamati dan mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Membandingkan perspektif apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Artinya, untuk memastikan kelemahan informasi dari informan, maka peneliti berusaha membandingkan pembicaraan informan yang 1 dengan yang lainnya dalam waktu yang berbeda.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu yaitu dengan membandingkan informasi yang didapat sebelum penelitian dan pada saat berjalannya penelitian. Artinya dalam hal ini, maka konsistensi ucapan informan merupakan salah satu kunci kebenaran data.

Untuk menguji keabsahan data maka dilakukan triangulasi dengan beberapa sumber yang berbeda, metode dan juga waktu untuk konfirmasi apakah data yang terkumpul itu sudah benar atau tidak.

3.6 Teknik Analisis Data

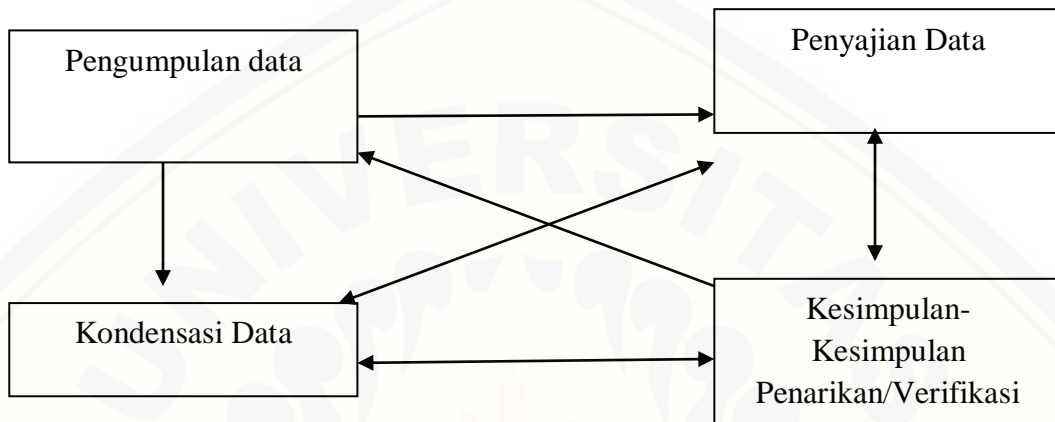
Analisis data menurut Miles dan Huberman (2014:14) adalah analisis yang dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Secara garis besar, ia membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dalam penelitian ini analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali hasil rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan yang ada direkaman tersebut. Setelah data yang diperoleh di lapangan dinilai sudah cukup memenuhi kebutuhan peneliti, maka dari sekian jenis data yang ada di lapangan kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian dari data yang sudah dikelompokkan menjadi kriteria, lalu di analisis dan dikaitkan dengan teori sosiologi terkait dari tema serta judul penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014:14) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Bentuk sistem pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh baik itu Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, dan HIPPA yang ada di Situbondo ini dinilai menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dan dibahas agar pengelolaan irigasi kedepannya lebih berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan petani masyarakat kesambirampak. Penganalisisan fenomena yang terjadi dengan keterkaitan terhadap teori yang digunakan, kemudian bisa menghasilkan berbagai bentuk pemecahan masalah yang terjadi di lapangan. Berbagai pemecahan permasalahan tersebut, kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dari keanekaragaman data yang ada untuk menjawab setiap rumusan masalah. Dari kesimpulan tersebut, peneliti juga

bisa memberikan saran-saran yang di nilai bisa menjadi pandangan dan masukan untuk lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Gambar 3.1 Proses Analisis Data



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles, Huberman dan Saldana. 2014:14)

1. Analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, factual atau obyektif-deskriptif.
2. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan salah satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.
3. Kondensasi data yang harus diperhatikan langkah-langkahnya yaitu:

- a. Meringkaskan data kontak langsung dengan orang ,kejadian dan situasi di lokasi penelitian.Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.
 - b. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidaknya-tidaknya empat hal:
 1. Digunakan simbol atau ringkasan
 2. Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu
 3. Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu
 4. Keseluruhan dibangun dalam suatu sistem yang integrative
 - c. Pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atas situasi sebagaimana adanya factual atau obyektif-deskriptif
 - d. Membuat catatan reflektif
 - e. Membuat catatan marginal
 - f. Penyimpanan data
 - g. Analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo
 - h. Analisis antar lokasi
 - i. Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih jelas bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.
4. Kesimpulan hasil penelitian yang diambil merupakan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini masih dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat lain pada saat proses verifikasi data di lapangan. Jadi proses verifikasi data dilakukan dengan cara peneliti terjun kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data kembali yang dimungkinkan akan memperoleh bukti-bukti kuat lain yang dapat merubah hasil kesimpulan sementara yang diambil. Jika data yang diperoleh memiliki keajegann (sama dengan data yang telah diperoleh) maka dapat diambil kesimpulan yang baku dan selanjutnya dimuat dalam laporan hasil penelitan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti maka hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam Tata kelola irigasi pertanian mengalami banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat tani yang ada di desa Kesambirampak. Hal ini disebabkan lembaga HIPPA tersebut mengalami penurunan aktivitasnya karena adanya disharmoni organisasi dan menguatnya faktor kepentingan yang dilakukan oleh petugas-petugas dari lembaga tersebut.

Upaya Dinas Pertanian dalam kaitannya dengan peningkatan produksi pangan selama ini memiliki kerja sama dengan Dinas Pengairan, Bappeda, LSM, dan HIPPA. Dalam hal ini Dinas Pertanian memberikan kontribusi berupa bantuan seperti bibit, pompa air, mesin dan sebagainya guna menunjang keberhasilan produksi pertanian yang ada di desa Kesambirampak.

Dinas Pengairan dalam hal pengelolaan irigasi tidak terlibat secara langsung dalam distribusi air pada petani. Dinas Pengairan hanya memantau datangnya air sampai di pintu sekunder. Selain itu, Para petugas pembuka pintu air dari Dinas Pengairan dalam mendistribusikan alokasi air, ia menerima uang dari Ketua Sub-Blok yang artinya uang tersebut sebagai upaya untuk memperlancar dalam pendistribusian air melalui *Ulu-ulu* yang berada dalam setiap wilayah masing-masing.

HIPPA sebagai organisasi Petani Pemakai Air Irigasi 2 (dua) tahun terakhir tidak berperan aktif dalam distribusi air mulai dari saluran tersier sampai ke petak sawah petani. Artinya dalam hal ini HIPPA “Tirtosari” di desa Kesambirampak tersebut mengalami kemacetan. HIPPA yang seharusnya ikut mengontrol keluar masuknya air ke petak sawah petani. Pada akhir-akhir ini tidak bekerja secara efektif sehingga menyebabkan distribusi air terganggu. Dalam beberapa hal HIPPA hanya ikut turun langsung jika mau ada bantuan. Hal ini dikarenakan lemahnya koordinasi

dalam organisasi HIPPA itu sendiri, demikian juga koordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Dampak dari lemahnya kinerja organisasi HIPPA tersebut di tengah masyarakat menyebabkan terjadinya konflik perebutan air irigasi antara petani dengan petani, bahkan pula terjadi di antara petani dengan *Ulu-ulu*. Disisi lain, kinerja *Ulu-ulu* menjadi sangat komersial, bahkan ada diantara petani dengan upaya memberi “uang insentif “ atau “uang rokok “ untuk mempercepat mendapatkan air. Persoalannya tidak hanya berhenti sampai disini, para petani dalam upaya mendapatkan air ia melakukan aksi mendahulukan penggunaan pupuk di tingkat awal sebagai alasan untuk lebih cepat memperoleh air. Kondisi penyimpangan ini menjadi berlarut-larut dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas baik dari pimpinan desa setempat ataupun dari pemerintah.

Kesemuanya ini menjadi suatu gambaran bahwa dalam kelembagaan pengelolaan irigasi pertanian masyarakat desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tidak berjalan efektif sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam distribusi air.

5.2 Saran

Hambatan dalam tata kelola irigasi, sebaiknya ada perhatian dari Kepala Desa atau Instansi Pemerintah yang berwenang memberi aturan sanksi yang jelas bagi *Ulu-ulu* dan Petani yang mencuri air yang tidak sesuai dengan gilirannya. Jika ada permasalahan di sawah, hendaknya diselesaikan dengan tegas tanpa ada pihak yang dirugikan. Tidak hanya itu, perlunya pemerintah meningkatkan pengawasan dilapangan agar tidak terjadi kasus pencurian air dan politik uang untuk memperoleh air.

HIPPA yang merupakan lembaga dari desa sebaiknya memberi perubahan ke arah yang lebih baik bagi petani Kesambirampak agar dapat menunjang pada kehidupan petani yang lebih baik. Selain itu kiranya perlu bagi lembaga HIPPA

meningkatkan pertemuan antara pengurus HIPPA dengan petani untuk meningkatkan partisipasi kemandirian HIPPA “Tirtosari”. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan kelembagaan antara lain dengan pembenahan fungsi, perlengkapan dasar hukum, kemampuan petugasnya dan peningkatan kinerja pimpinan desa atau pimpinan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Duverger, Maurice. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E, Suzanne. 1996. *Irigasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ferystiawan, Mirza. 2010. *Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus*. Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- [Http://desakapongan1.blogspot.com](http://desakapongan1.blogspot.com).
- Jayanti, Nur. 2006. *Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasandaran,Efendi.1988.*Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi*. Jakarta:PT.Gramedia.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University.
- Pusposutardjo,Suprodjo.2001. *Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air*.Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Soekanto,Soerjono.2012.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratiyah,Ken. 2015. *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Susan,Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta : Kencana.
- Syahyuti. 2006. *Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian*. Jakarta Selatan : PT. Bina Rena Pariwisata.
- Syahyuti,dkk. 2014. *Organisasi Kesejahteraan Petani*. Bogor : IPB Press.

Yuswadi,Hary. 2005. *Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jember: Kompyawisda Jatim.

-----, 2001. *Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan*. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional



LAMPIRAN



Lampiran A. Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA BERSAMA DINAS PENGAIRAN

Identitas Informan :

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Bagaimana cara ulu-ulu/ sub-blok untuk mendapatkan air ?

Bagaimana aturan-aturan yang diterapkan oleh Dinas Pengairan dalam pengelolaan irigasi ?

Apakah jika ada rapat yang dilakukan oleh HIPPA ikut berpartisipasi hadir?

Siapa petugas pengairan yang ditugaskan hadir pada acara rapat?

Bagaimana hubungan antara ketua HIPPA dengan Dinas Pengairan?

Seberapa sering konflik pembagian air terjadi?

Bagaimana koordinasi memantau pengelolaan air?

PANDUAN WAWANCARA BERSAMA DINAS PERTANIAN

Identitas Informan :

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Bagaimana koordinasi Dinas Pertanian dalam hal pengelolaan irigasi?

Bagaimana sistem pembagian jenis tanaman?

Siapa Petugas Pertanian yang lebih didengar oleh masyarakat petani?

Apakah pernah ada masalah dengan HIPPA?

Bagaimana Kontribusi Dinas Pertanian terhadap masyarakat petani?

PANDUAN WAWANCARA BERSAMA HIPPA

Identitas Informan:

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Dimana tempat tinggal rumah anda?

Bagaimana awal terbentuknya HIPPA?

Dalam setiap bulan/ tahun, apakah sering melakukan rapat koordinasi dengan petani?

Bagaimana terkait dengan dengan dana IPAIR ?

Siapa yang mengelola dana IPAIR?

Bagaimana transparasi pembayaran IPAIR?

Apakah HIPPA disini sudah berbadan Hukum?

Bagaimana Hubungan HIPPA dengan Dinas Pertanian?

Bagaimana hubungan masyarakat petani dengan HIPPA?

Seberapa sering konflik pembagian air irigasi terjadi?

Bagaimana aturan-aturan yang diberlakukan oleh HIPPA terhadap masyarakat petani?

Apakah kendala dalam pelaksanaan program HIPPA?

Apakah HIPPA membuat AD/ART setiap tahunnya?

Siapakah yang paling banyak berperan antara su-blok dan *ulu-ulu*?

PANDUAN WAWANCARA BERSAMA KETUA SUB-BLOK

Identitas Informan :

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Bagaimana cara Petani mendapatkan air?

Berapa kali mengairi sawah dalam seminggu?

Berapa lama air dialirkan ke petak sawah petani?

Bagaimana hubungan masyarakat petani dengan ketua sub-blok?

Seberapa sering konflik irigasi terjadi?

Bagaimana hubungan antara Dinas Pengairan dengan ketua sub-blok?

Bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi permasalahan pembagian air?

Apakah su-blok mempunyai jadwal tanam dari petani?

Jika air kurang, bagaimana cara mengatasinya?

Jika air datang, kira-kira berapakah pendapatan uang yang diperoleh?

Berapakah uang yang didapatkan oleh tukang “turap”?

Jika ada petani mencuri air, apakah terdapat sanksi?

Jika ada suatu masalah, apakah sub-blok pernah dipanggil oleh HIPPA?

Apakah air berpengaruh terhadap jumlah produksi?

PANDUAN WAWANCARA BERSAMA PETANI

Identitas Informan :

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Bagaimana cara petani untuk mendapatkan air?

Berapa kali mengairi sawah dalam seminggu?

Bagaimana hubungan petani dengan HIPPA?

Apakah pernah terjadi konflik pembagian air?

Siapa yang lebih banyak berperan dalam mengatasi permasalahan air?

Bagaimana HIPPA menyelesaikan permasalahan air?

Apa saja produksi pertanian tanaman pangan yang dijadikan produksi unggulan di desa ini?

Apakah petani pernah diikutsertakan dalam pembuatan AD/ART HIPPA?

Apakah HIPPA rutin mengadakan rapat?

Apakah bapak merasakan adanya manfaat dari HIPPA?

Apakah bapak membayar IPAIR?

Apakah pernah membayar, terus tidak di airi pak?

Biasanya *norap* berapakali?

Apakah ada sanksi jika petani tidak bayar IPAIR?

Lampiran B. Transkrip Wawancara

a. Transkrip wawancara dengan petani daerah kesambirampak

TRANSKIP WAWANCARA**AGUS****MINGGU, 27 November 2017**

Peneliti : Bagaimana cara petani untuk mendapatkan air?

Informan: Ya yang pasti koordinasi dengan tukang turap dan sub-blok yang terakit. Yang dikhawatirkan disana oleh petani terkait pada saat gilir – gelondong, karena pada saat gilir-gelondong air yang dibutuhkan akan ditutup. Kan itu biasanya di jadwal.

Peneliti : Berapa kali mengairi sawah dalam seminggu?

Informan: Ya gak tentu. Tergantung dari tukang turapnya. Airnya kondisinya bagaimana. Misalnya tanaman 10 hektar, ya sama petani disesuaikan dengan jenis tanamannya.

Peneliti : Bagaimana hubungan petani dengan tukang turap?

Informan : Koordinasi ya harus lancar, kalau misalnya petani membutuhkan air kan harus berhubungan dengan tukang turap. Jadi ya harus baik-baiklah sama tukang turap. Biar gampang nanti dapat airnya. Ya tapi itu, *nurap* ngasih uang atau rokok buat *tokang torapnya* (tukang turap) *ongkossa kasoh* (uang lelah).

Peneliti : Apakah pernah terjadi konflik pembagian air?

Informan : Pasti. Biasanya kalau terjadi pembagian air, apalagi musim kemarau. *Huhh..aing sara* (huh..air susah). *Mun pas tak eaengi bik tokang torap rapas mukkak aing dibik. Jek mun tak eberri opah abid seollea* (Kalau

tidak diari sama tukang turap ,kadang petani membuka air sendiri . Kalau misal tidak memberi upah, susah yang mau mendapatkan air).

Peneliti: Siapa yang lebih banyak berperan dalam mengatasi permasalahan air?

Informan; Ya tukang turap

Peneliti :Bagaimana HIPPA menyelesaikan permasalahan air?

Informan :Masalahnya itu biasanya pada saat musim kemarau. Ya HIPPA berpedoman pada jadwal giliran yang sudah di sepakati. HIPPA nya jarang turun kalau ada masalah di sawah.

Peneliti :Apa saja produksi pertanian tanaman pangan yang dijadikan produksi unggulan?

Informan :Padi. Petani sini dari dulu lebih banyak menanam padi. Kalau sudah musim ke 3 biasanya jagung. Kadang-kadang juga menanam terong dan cane. Tapi jarang.

Peneliti : Bagaimana terkait dengan tradisi pertanian yang masih ada sampai saat ini?

Informan: Ya kalau tradisi-tradisi pertanian sekarang sudah tidak kayak jaman dulu. Kalau sekarang apa yaa..paling nanti kalau sudah panen itu ya *selamettan*.

Peneliti: Apakah petani pernah diikuti sertakan dalam pembuatan AD/ART HIPPA?

Informan: tidak..tidak pernah diikuti.

Peneliti: Apakah HIPPA rutin mengadakan rapat?

Informan:Jarang..ya seperlunya saja rapat..gak pas sering

Peneliti: Apakah bapak merasakan adanya manfaat dari HIPPA?

Informan: biasa saja..yang paling banyak bermanfaat ya ulu-ulu

Peneliti:Apakah bapak membayar IPAIR?

Informan: ya bayar kalau ditagih

Peneliti:Apakah pernah membayar, terus tidak di airi pak?

Informan: Ya pernah..kadang cuma dapat salokke..mati

Peneliti:Biasanya *norap* berapakali?

Informan: ya tergantung jenis tanamannya

Peneliti: Apakah ada sanksi jika petani tidak bayar IPAIR?

Informan: Tidak ada..



TRANSKIP WAWANCARA**NONO****MINGGU,03 Desember 2107**

Peneliti : Bagaimana cara petani untuk mendapatkan air?

Informan: Untuk mendapatkan air saya koordinasi dengan tukang turap. Kemudian melaporkan kalau saya mau garap sawah kapan, biar dapat giliran. Petani yang paling diutamakan dalam menggarap sawah itu airnya. Kalau airnya kurang maka tanaman yang dihasilkan tidak bagus.

Peneliti : Berapa kali mengairi sawah dalam seminggu?

Informan : Kalau saya tergantung tanahnya. Biasanya kalau saya seminggu sekali. Sawah saya berada di depan.

Peneliti : Bagaimana hubungan petani dengan tukang turap?

Informan: Ya itu .Sama tukang turapnya harus komunikasi yang baik. Kadang ya itu, tukang turapnya jarang ngontrol air kalau gak dikasih uang. Sekali turap itu paling tidak ya 10ribu.

Peneliti: Apakah pernah terjadi konflik pembagian air?

Informan: Ya sering. Kadang ya kalau petani tidak mendapat jatah air, ya mencuri air. Mau nunggu tukang turapnya ..ya takut rusak *panjeknya*(tanaman padi yang masih baru ditanam)

Peneliti : Siapa yang lebih banyak berperan dalam mengatasi permasalahan air?

Informan: Ya tukang turap sama sub-blok

Peneliti : Bagaimana HIPPA menyelesaikan permasalahan air?

Informan: Ya kalau ada masalah biasanya HIPPA koordinasi dengan tukang turap dan sub-bloknya. Permasalahannya bagaimana. Nanti dirapatkan bersama kelompok tani dan masyarakat petaninya.

Peneliti: Apa saja produksi pertanian tanaman pangan yang dijadikan produksi unggulan?

Informan: Ya biasanya padi.Nanti kalau sudah musim ke 3 baru jagung. Kalau padi itu gini,istilahnya menjanjikan lah. Kalau misal harga gabah turun, ya petani tidak menjualnya.Melainkan di selep sendiri, terus hasilnya itu bisa di simpan buat persediaan kebutuhan kedepannya.

Peneliti:Apakah petani pernah diikutsertakan dalam pembuatan AD/ART HIPPA?

Informan: tidak..paling ya Cuma rapat ikut

Peneliti:Apakah HIPPA rutin mengadakan rapat?

Informan: tidak..jarang

Peneliti:Apakah bapak merasakan adanya manfaat dari HIPPA?

Informan:biasa saja..kalau urusan air masih banyak Ulu-ulu dan Sub-Blok

Peneliti:Apakah bapak membayar IPAIR?

Informan: Kalau ditagih sub-blok ya bayar..kalau gak ditagih ya sudah gak usah

Peneliti:Apakah pernah membayar, terus tidak di airi pak?

Informan: Ya pernah..sudah biasa seperti itu. Tapi nanti dijanjikan yang akan datang

Peneliti: Biasanya *norap* berapakali?

Informan: ya menyesuaikan jenis tanamannya..biasanya padi yang palin banyak torapan

Peneliti: Apakah ada sanksi jika petani tidak bayar IPAIR?

Informan: ya tidak ada...

TRANSKIP WAWANCARA**SAMSURI****JUM'AT, 17 November 2017**

Peneliti: Bagaimana cara petani untuk mendapatkan air?

Informan: Ya harus laporan dulu ke tukang turap. Kalau gak laporan ya gak bakalan dapat air.

Peneliti: Berapa kali mengairi sawah dalam seminggu?

Informan: Ya gaak tentu. Sawah saya kan berada di depan, jadi ya mudah dapat air. Tapi kalau musim hujan saya gak pernah mengairi, soalnya itu banyak keongnya. Jadi gak usah saya airi, kalau ke masukan air nanti kan tanahnya lunak.

Peneliti: Bagaimana hubungan petani dengan tukang turap?

Informan: Ya harus baik. Kalau aturan HIPPA ke Sub-Bloknya, itu sama sub-bloknya digilir. Umpamanya punya tukang turap 3. Itu nanti dibagi, misal 2 hari si A, 2 hari si B. Cukup gak cukup harus digilir. Ya kadang walaupun sudah laporan, tukang turapnya jarang menontrol air.

Peneliti: Apakah pernah terjadi konflik pembagian air?

Informan: Ya. Kadang ada petani yang istilahnya "nambek aing kaadek". Ya kadang ada petani yang mencuri air tanpa laporan dulu. Kadang sudah bayar ke tokang torapnya, tapi gak diiri. Repot dek ...biasanya konfliknya itu musim kemarau. Karena para petani saling merebut untuk mendapat jatah air. Kadang sudah tau giliran saya, tiba-tiba sawah yang punya totok itu yang mencuri air.

Peneliti: Siapa yang lebih banyak berperan dalam mengatasi permasalahan air?

Informan: ya kalau dari petani ya sub-blok bersama tukang turap. Nanti dari juru pengairan juga ikut mengatasi.

Peneliti: Bagaimana HIPPA menyelesaikan permasalahan air?

Informan: Ya dari HIPPA itu diselesaikan sesuai dengan permasalahannya bagaimana. Nanti dimusyawarahkan, paling permasalahannya ya Cuma pencurian air dan kekurangan. HIPPA jarang turun kalau ada masalah air.

Peneliti: Apa saja produksi pertanian tanaman pangan yang dijadikan produksi unggulan?

Informan: Ya paling banyak kalau disini padi. Sejak jaman embah saya dulu sudah menanam padi yang peling sering ditanam, apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Keseringan padi.

Peneliti: Bagaimana terkait dengan tradisi pertanian yang masih ada sampai saat ini?

Informan: Kalau saya sampai sekarang ya masih tetap ikutin tradisi dulu. Sebelum menanam atau istilahnya “*Manjek*” yaitu membuaat *sasandhing* (Nasi, Kue 7 warna, pisang). Nanti itu *sasandhingnya* diberikan kepada buruh tani yang *manje*’ itu.

Peneliti: Apakah petani pernah diikutsertakan dalam pembuatan AD/ART HIPPA?

Informan: gak pernah..itu sudah apa katanya HIPPA

Peneliti: Apakah HIPPA rutin mengadakan rapat?

Informan: jarang ..ya sekitaran 6 bulan sekali

Peneliti: Apakah bapak merasakan adanya manfaat dari HIPPA?

Informan: yang dirasakan ya manfaatnya tokang torap

Peneliti: Apakah bapak membayar IPAIR?

Informan: ya kalau ditagih bayar

Peneliti: Apakah pernah membayar, terus tidak di airi pak?

Informan: Ya pernah..

Peneliti: Biasanya *norap* berapakali?

Informan: ya menyesuaikan jenis tanamannya..kalau padi paling tidak seminggu sekali

Peneliti: Apakah ada sanksi jika petani tidak bayar IPAIR?

Informan: ya tidak ada...

TRANSKIP WAWANCARA**SUPANDI****MINGGU,26 November 2017**

Peneliti: Bagaimana cara petani untuk mendapatkan air?

Informan: Ya menghubungi kelompok tukang turap.

Peneliti: Berapakah mengairi sawah dalam seminggu?

Informan: Ya tergantung jenis tanamannya. Kalau padi tiap hari mesti butuh air, kalau jagung ya sekitaran 15 hari dah baru turap ke dua.

Peneliti: Bagaimana hubungan petani dengan tukang turap?

Informan: Ya gitu. Biasanya ya bayar, melihat keadaan ekonominya dan keadaan sawah lah. Seikhlasnya. Ya kadang biasanya berbentuk kiriman lah. Kayak rokok, kalau gak rokok ya sekitaran 10ribu lah dalam sekali turap. Kalau petani sadar terhadap kewajibannya..ya artinya diopenilah..ya bauik-baik saja.

Peneliti: Apakah pernah terjadi konflik pembagian air?

Informan: Ya. Seperti itu dah. Minta air tanpa ada uang ya bermasalah. Ya baik-baiklah sama tukang turap.

Peneliti: Siapa yang lebih banyak berperan dalam mengatasi permasalahan air?

Informan: Ya itu biasanya yang berperan sub-blok bersama HIPPA

Peneliti: Bagaimana HIPPA menyelesaikan permasalahan air?

Informan: Ya anantara sub-blok bersama kelompok itu dikumpulkan. Diundang ,kemudian dirundingkan, biasanya di rapatkan di rumah ketua HIPPA. Jamannya Hj. Amir HIPPA nya kurang aktif.

Peneliti: Apa saja produksi pertanian tanaman pangan yang dijadikan produksi unggulan di desa ini?

Informan: Ya padi. Disnini kan pola tanamya padi-padi-palawija

Peneliti: Bagaimana tradisi pertanian yang masih tetap dilestarikan?

Informan:Gak ada. Paling ya cuma buat *sasandhing* itu pas mau awal tanam.



TRANSKIP WAWANCARA**ROHAEDI****JUM'AT, 24 November 2017**

Peneliti: Bagaimana cara petani untuk mendapatkan air?

Informan: Pertama itu ya harus laporan kepada tukang turap

Peneliti: Berapa kali mengairi sawah dalam seminggu?

Informan: Kalau musim hujan seperti ini tiap hari sudah mendapatkan air. Kecuali di daerah yang paling hilir. Kalau di daerah hilir itu baru 3 hari untuk mendapatkan air.

Peneliti: Bagaimana hubungan petani dengan tukang turap?

Informan: Ya harus baik. Kalau gak koordinasi dengan baik, nanti tidak mendapatkan air. Biasanya kadang tukang turap itu, *se bede pessena ekalak kaadek* (yang ada uangnya diambil duluan)

Peneliti: Apakah pernah terjadi konflik pembagian air?

Informan: ya ada..biasanya terjadi saat musim kemarau. Karena kalau musim kemarau air susah.

Peneliti: Siapa yang lebih banyak berperan dalam mengatasi permasalahan air?

Informan: Di lapangan ya juru pengairan bersama HIPPA. Kalau bagi petani yang lebih banyak berperan tukang turap.

Peneliti: Bagaimana HIPPA menyelesaikan permasalahan air?

Informan: Mengadakan sosialisasi terhadap wilayah yang ada masalah. Kadang ya itu dek, HIPPA nya jarang turun. Baru kalau ada bantuan, seperti proyek pembangunan, itu baru turun.

Peneliti: Apa saja produksi pertanian tanaman pangan yang dijadikan produksi unggulan di desa ini?

Informan: Ya kalau musim hujan banyak produksi padi, musim tanam ke dua tetap padi, dan kalau sudah musim ke tiga baru jagung.

- b. Transkrip wawancara dengan pengurus HIPPA Tirtosari

TRANSKIP WAWANCARA

DUHRAM

JUM'AT, 10 November 2017

Peneliti : Bagaimana cara petani mendapatkan air?

Informan: Pertama kalinya pendapatan air tergantung keadaan air. Kalau air masih cukup, itu usulan kebutuhan -kebutuhan air dipenuhi, seandainya tidak cukup digilir perhari.

Peneliti: Berapa kali mengairi sawah dalam seminggu?

Informan : Dalam tiap minggunya mengairi sawah tergantung jenis tanaman. Ya kalau padi dengan jagung membutuhkan air tidak sama. Kalau padi seandainya air cukup ya sehari-hari, kalau jagung menurut kebutuhan jagung mulai pertama kali tanam itu di airi dulu, itu sebelum tanam. Setelah itu, setengah kering baru ditanam. Setelah itu tunggu perkembangan tumbuhnya jagung. Kalau jagung tumbuh rata, tidak perlu diairi lagi.

Peneliti : Berapa lama air dialirkan ke petak sawah petani?

Informan : Itu tergantung kebutuhan air. Lamanya gak tentu. Karena biasanya kalau misalnya tanaman jagung, apalagi kalau misal jagung kurang air biasanya buahnya hasilnya tidak bagus. Alias salah *torapan*

Peneliti : Bagaimana hubungan masyarakat petani dengan ketua sub-blok?

Informan: Ya kalau petani tidak berhubungan langsung dengan sub-blok. Petani berhubungan langsung dengan kelompok atau *ulu-ulu*. Tukang turap (*ulu-ulu*) langsung berhubungan dengan sub-blok. Kalau masih banyak kebutuhan dengan kelompok, itu tidak diterima dengan sub-blok.

Sub-blok menerima sesuai dengan keadaannya petani. Bisa ditunda keesokannya. Sub-blok menerima masalah sesuai dengan kondisi air. Yang banyak berperan oleh petani itu tukang turap.

Peneliti : Seberapa sering konflik irigasi terjadi?

Informan : “dulu pernah ada pemberhentian-pemberhentian kelompok (tukang turap) sesuai dengan laporan petani kepada sub-blok. Itu awalnya gini, ada petani B laporan ke tukang turap, itu sudah waktunya gilirannya yang petani B memang, *pas bik tokang torappa eoper aingna ke yang petani C . Kan ruce nyamana tokang torappa.. lah kare aberrik pesse* (tiba-tiba sama tukang turap airnya dialihkan ke petani C. Kan curang namanya. Padahal sudah ngasih uang).

Peneliti: Bagaimana Hubungan Dinas Pengairan dengan Ketua Sub-Blok?

Informan: Ketua Sub-Blok tidak pernah berhubungan dengan Dinas Pengairan. Dinas Pengairan ada hubungannya dengan HIPPA. Tapi apa yang diperintahkan oleh HIPPA Sub-bloknya ya harus patuh.

Peneliti: Bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi permasalahan air?

Informan: Penyelesaiannya tergantung dari keadaan kebutuhan air. Penyelesaiannya Sub-blok itu harus lapor sama HIPPA. HIPPA berhubungan langsung dengan Dinas Pengairan. Apa airnya perlu ditambah atau gimana. Ya terserah disana.

Peneliti: Apakah sub-blok mempunyai jadwal tanam dari petani?

Informan: ya ada..biasanya tanamnya itu padi-padi-padi jagung

Peneliti: Jika air kurang, bagaimana cara mengatasinya?

Informan: ya dijanjikan air yang akan datang berikutnya

Peneliti: Jika air datang, kira-kira berapakah pendapatan uang yang diperoleh?

Informan: ya sekitaran 500 lah

Peneliti: Berapakah uang yang didapatkan oleh tukang “turap”?

Informan: ya tergantung..kadang kan ada petani yang Cuma memberi rokok

Peneliti: Jika ada petani mencuri air, apakah terdapat sanksi?

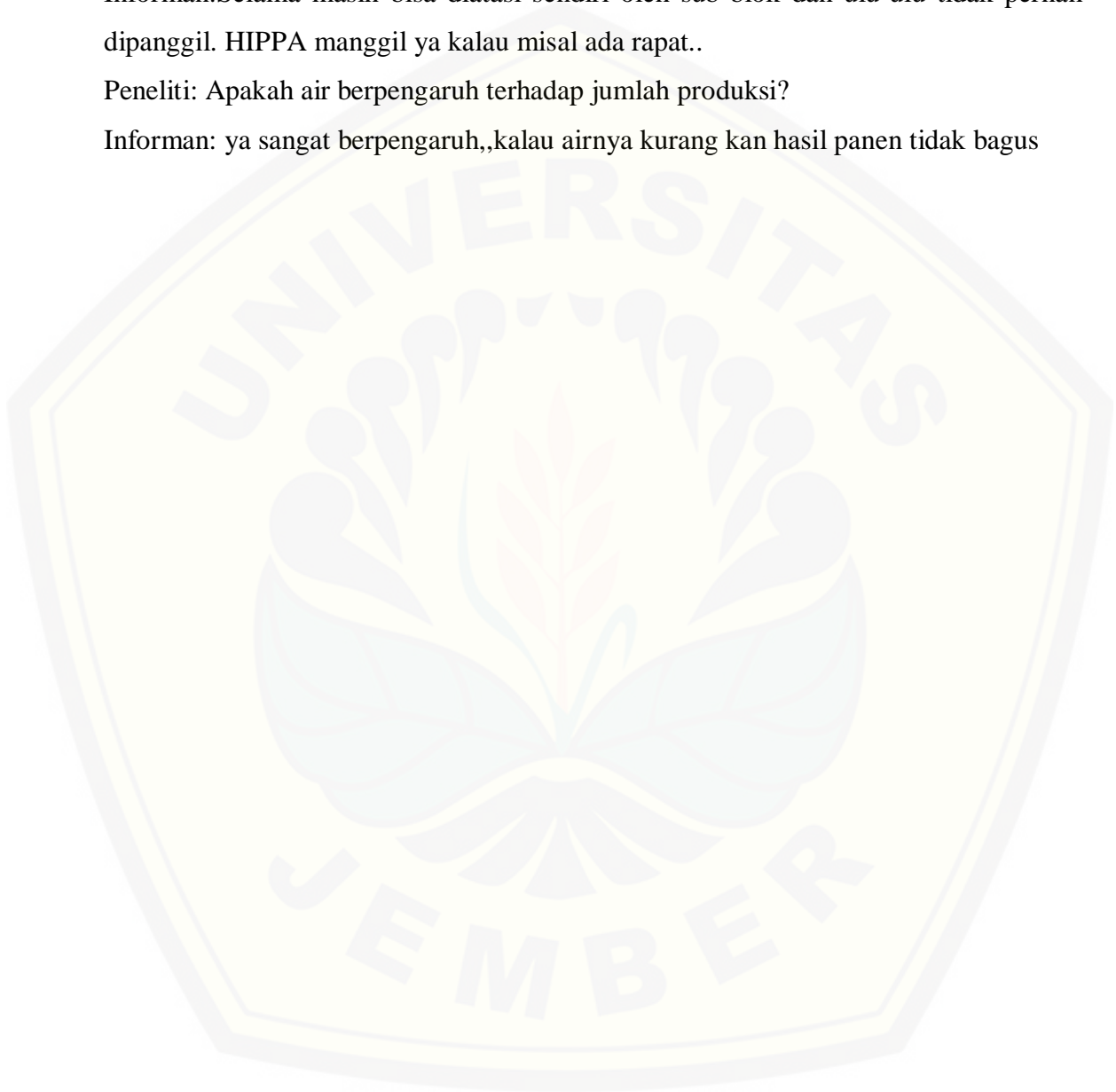
Informan: tidak ada sangsi..

Peneliti: Jika ada suatu masalah, apakah sub-blok pernah dipanggil oleh HIPPA?

Informan: Selama masih bisa diatasi sendiri oleh sub-blok dan ulu-ulu tidak pernah dipanggil. HIPPA manggil ya kalau misal ada rapat..

Peneliti: Apakah air berpengaruh terhadap jumlah produksi?

Informan: ya sangat berpengaruh,,kalau airnya kurang kan hasil panen tidak bagus



TRANSKIP WAWANCARA**MISNADIN****MINGGU,05 November 2017**

Peneliti :Bagaimana cara petani mendapatkan air?

Informan: *Enggi kodu laporan gellu . Engak samacemma palabije kodu laporan. Saompama panjek enggi tak usah laporan,mun panje gerua nape pon cakna tokang torap.Perak mun dile asaka'a gerua laporan. Mun saompama panje'dile abutoka gerua laporan.(ya harus laporan dulu. Semacam jenis palawija harus laporan terlebih dahulu. Seandainya ditanami padi tidakperlu laporan. Jika menanam padi untuk mendapatkan air apa katanya ulu-ulu. Baru kalau sudah mau bajak sawah laporan. Dan jika mau memupuk baru laporan).*

Peneliti: Berapa kali mengairi sawah dalam seminggu?

Informan:*Mun panjek ros-terrosan. Mun palabije paleng talebet enggi pon 5kale. Gerua tergantung cakna petanina. Tergantung kuatta petani. Mun misal 7kale enggi gerua 70ebu. Mun malle irit 5kale gerua pon cokop.(Kalau tanaman padi setiap saat. Sedangkan palawija paling banyak 5kali. Teragntung dari petani. Kalau misalnya 7kali mengairi ya 70ribu. Supaya irit sebenarnya 5 kali sudah cukup). Kadeng lah bede se abele mare abutok, malle sakejkek olle aing.tape ye jek torokna enten.(Kadang ada petani yang bilang sudah memupuk tanamannya, supaya cepat mendapat air. Sebenarnya ya tidak).*

Peneliti: Berapa lama air dialirkan ke petak sawah petani?

Informan: *Tergantung cakna rajena aing. Mun pon aing raje delemmanna saereng deri laggu sampe bedduk pon olle. Tape mun pas aing kenik saedu kadeng sampek malem.(Tergantung dari besarnya air. Kalau misalnya air*

besar dalam 4kotak sawah dari pagi sampai duhur. Akan tetapi kalau air kecil dalam 2 kotak sawah sampai malam).

Peneliti: Bagaimana hubungan masyarakat petani dengan ketua sub-blok?

Informan: *Begus. Mun ka sub-blok niko tadek panyakekna. Sebede panyakekna ka tokang torap. Jek kadeng tokang torap kodu rasani gellu ngaengana ain. Saompama tak bender bule arasan ka tokang torap.* (Bagus. Jika ke sub-blok gak bermasalah. Yang bermasalah dengan *ulu-ulu*. Kadang *ulu-ulu* harus dirasakan dulu buat mengairi sawah. Seandainya *ulu-ulu* gak benar, ketua sub-blok memberi teguran ke *ulu-ulu*).

Peneliti: Seberapa sering konflik irigasi terjadi?

Informan: *Mun se bule enggi jarang. Tak oning se laenna. Mun bule mon pon tak bender erasani. Tembeng petani enger. Kadeng bede petani mendadak menta aing, gerua tak norok kapra. Enggi pon etoro'agi bhei. E birampak dissak lako enger bhei tokang torappa. Tak norok atoran.* (Kalau yang saya jarang. Tidak tahu kalau yang lainnya. Kalau yang saya kalau sudah tidak benar saya saya tegur. Daripada petani ramai. Kadang-kadang ya ada petani mendadak sawahnya minta diari. Itu gak ikut kapra. Ya dituruti saja. Di Kesambirampak sering konflik terus *ulu-ulu* nya . Tidak ikut aturan).

Peneliti: Bagaimana hubungan Dinas Pengairan dengan Ketua Sub-blok?

Informan: *Enggi paggun bede kerja sama. Mun se Duhram bule tak oning. Bereng wawan bik yoyok bule bede kerjasama. Jek bule ca oca'an saeket aberrik. Bule aberrikna ka wawan rua. Tak aberrik ka mathari. Tekkak duhram bule melleagi. Enggi nyamana kerja sama. Je' mantre adente ni. Enggi bule pon ngarte.* (Ya tetap ada kerja sama. Kalau yang duhram saya tidak tahu. Kerja sama dengan wawan dan yoyok. Saya kasih uang 50ribu. Biasanya saya memberi ke wawan, bukan ke matahari. Walaupun yang duhram saya yang belikan. Namanya ya kerja sama. Ya mantri menunggu. Tapi saya ngerti maksudanya).

Peneliti: Bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi permasalahan air?

Informan: *Enggi norok atoran. Kan pon bede atoranna. Atoranna bede e undang-undang, bede polisina. Tape jenua nonto alanjengana geniko. Jerengan aing andikna petani, enggi edina. Mun pas mamadulen, nonto ekabeji'i petani.* (Ya ikut aturan. Kan sudah ada aturannya. Aturannya ada di undang-undang, ada polisinya. Tapi saya tidak memperpanjang masalah. Kan air memang punya petani, ya di biarkan. Kalau misal melaporkan, ya dibenci sama petani)

Peneliti: Apakah su-blok mempunyai jadwal tanam dari petani?

Informan: *enggi bede bing..tape tekkak tak ecatet gilirena bule paggun engak* (ya ada..walapupun gak dicatat gilirannya saya tetap ingat)

Peneliti: Jika air kurang, bagaimana cara mengatasinya?

Informan: *enggi ejenji'i dile begien aing se detengnga* (ya dijanjikan air yang akan datang berikutnya)

Peneliti: Jika air datang, kira-kira berapakah pendapatan uang yang diperoleh?

Informan: 500-700 gedie pon

Peneliti: Berapakah uang yang didapatkan oleh tukang “turap”?

Informan: *mun geniko bule tak oning. gerua kan cakna petanina..enggi saroko'an pon* (kalau itu saya tidak tahu,,itu tergantung dari petaninya..ya sekitaran harga rokok itu)

Peneliti: Jika ada petani mencuri air, apakah terdapat sanksi?

Informan: *sobung bing..enggi perak erasani* (tidak ada..ya Cuma diperingati)

Peneliti: Jika ada suatu masalah, apakah sub-blok pernah dipanggil oleh HIPPA?

Informan: *enggi mun gik bisa eatasi dibik..tak usah bing* (kalau masih bisa diselesaikan sendiri tidak usah)

Peneliti: Apakah air berpengaruh terhadap jumlah produksi?

Informan: *engggi bing..mun aingnga korang..kan pas jubek ollena* (ya..kalau airnya kurang hasilnya jelek)

TRANSKIP WAWANCARA**SAMSUL HADI****JUM'AT, 20 Oktober 2017**

Peneliti: Dimana tempat tinggal rumah anda?

Informan: Desa Kesambirampak Karang Malang RT 02 RW 08

Peneliti: Bagaimana awal terbentuknya HIPPA di desa kesambirampak?

Informan: Ya awal terbentuknya pertama itu dek ya atas usulan dari petani. Sistem pemilihannya ya dipilih langsung oleh masyarakat petani. Saya ini generasi yang ke berapa wes dek jadi Ketua HIPPA. HIPPA itu sudah ada sejak dulu dek. Saya ini ketua HIPPA baru dek periode 2017, SK nya ini masih belum turun. HIPPA nya ini namanya Tirtosari. Ya mungkin, dari jaman dulu itu sudah ada. biar petaninya lebih mudah , makanya HIPPA sudah ada sejak dulu.

Peneliti: Dalam setiap bulan/ tahun, apakah sering melakukan rapat koordinasi dengan petani?

Informan : Ya dibilang sering ya gak juga dek. Kalau sesuai AD ART rapat itu dilakukan setiap 6 bulan sekali, akan tetapi disini kalau rapat dengan petani bersama sub-blok itu dilakukan setiap 4 bulan sekali. Tapi ya gak semua program yang ada di AD/ART itu terlaksana .

Peneliti : Bagaimana terkait dengan dana IPAIR?

Informan: ya petani bayar IPAIR. Kalau tanaman Padi itu biasaya 30 rb per lokke (tiap petak). Kalau Palawaija 25rb. Ya kadang ada juga petani yang gak bayar. Bayarnya setiap tiga bulan sekali itu,,waktu petani sudah panen.

Peneliti: Siapa yang mengelola dana IPAIR?

Informan: Ya bendahara HIPPA itu biasanya.

Peneliti : Apakah HIPPA disini sudah berbadan hukum?

Informan : Ya sudah berbadan hukum

Peneliti : Siapa saja pengurus dalam anggota HIPPA?

Informan: Kalau berdasarkan SK yang lama itu Ketunya, Hj.Amir. Sekretaris, Rukmono. Bendahara, Arnoto. Kalau yang berdasarkan SK sekarang belum keluar masih, kan baru bulan kemarin pembentukannya.

Peneliti : Bagaimana hubungan masyarakat petani dengan HIPPA?

Informan :Ya harmonis. Kan HIPPA butuh masyarakat, sebaliknya ya juga masyarakat butuh lembaga HIPPA.

Peneliti: Bagaimana aturan-aturan yang diberlakukan oleh HIPPA?

Informan: Ya aturannya kalau missal ada petani melanggar. Kembali sesuai aturan dengan AD/ART itu. Tapi ya itu dek..meski ada aturan AD/ART itu kalau ada petani yang melanggar paling ya Cuma di tegur. Gak ada sanksi yang jelas. Kalau missal Sub-blok ya paling cuma sekedar peringatan itu.

Peneliti: Apakah pernah terjadi konflik antar petani?

Informan: Sering. Pernah terjadi karena kelompok tani tidak memberikan laporan kepada sub-blok. Petani disini ya kan kadang karepnya dibik tuh(Seenaknya sendiri). Se penting olle aing.(yang penting dapat air). Susah diatur ..repot dek.

Peneliti: Bagaimana HIPPA menyelesaikan permasalahan air?

Informan: Ya biasanya kan ada pertemuan itu, bersama petani dan sub-blok. Kalau masih bisa diatasi oleh tukang turap dan sub-bloknya, ya gak perlu ada pertemuan.

Peneliti: Apakah kendala dalam pelaksanaan program HIPPA?

Informan:Kalau kondisi air kecil,pelayanan terhadap sub-blok kepada petani kurang maksimal

Peneliti: Apakah HIPPA membuat AD/ART setiap tahunnya?

Informan: ini meneruskan yang lama

c. Transkrip wawancara dengan Dinas Pengairan UPTD Kecamatan Panji

TRANSKIP WAWANCARA

MATHARI

JUM'AT, 27 OKTOBER 2017

Penelit : Bagaimana cara ulu-ulu atau sub-blok untuk mendapatkan air?

Informan: Ulu-ulu mempunyai cara sendiri untuk mendapatkan air. Artinya ya waktu air hidup/besar. Misal di bagian hulu, ya mereka bekerja sendiri untuk mendapatkan air. Paling dari Dinas Pengairan selaku juru hanya memantau saja. Tiap pintu itu kan dibatasi , tidak sembarangan melepas air. Tergantung kebutuhan baku sawahnya

Peneliti: Apakah jika ada rapat yang dilakukan oleh HIPPA bersama sub-blok ikut berpartisipasi hadir?

Informan: Iya kalau diundang ya hadir. Biasanya HIPPA melakukan rapat secara intern. Dinas Pengairan jarang melakukan rapat bersama HIPPA, paling ya 3X itu dah.

Peneliti: Bagaimana hubungan Dinas Pengairan dengan HIPPA?

Informan: Hubungannya ya harmonis. Gak ada pemasalahan. Permasalahannya itu..HIPPA Tirtosari *tak pate aktif*(gak begitu aktif), itu yang sekarang sudah agak mendingan..apabila dibandingkan dengan ketua HIPPA yang dulu.

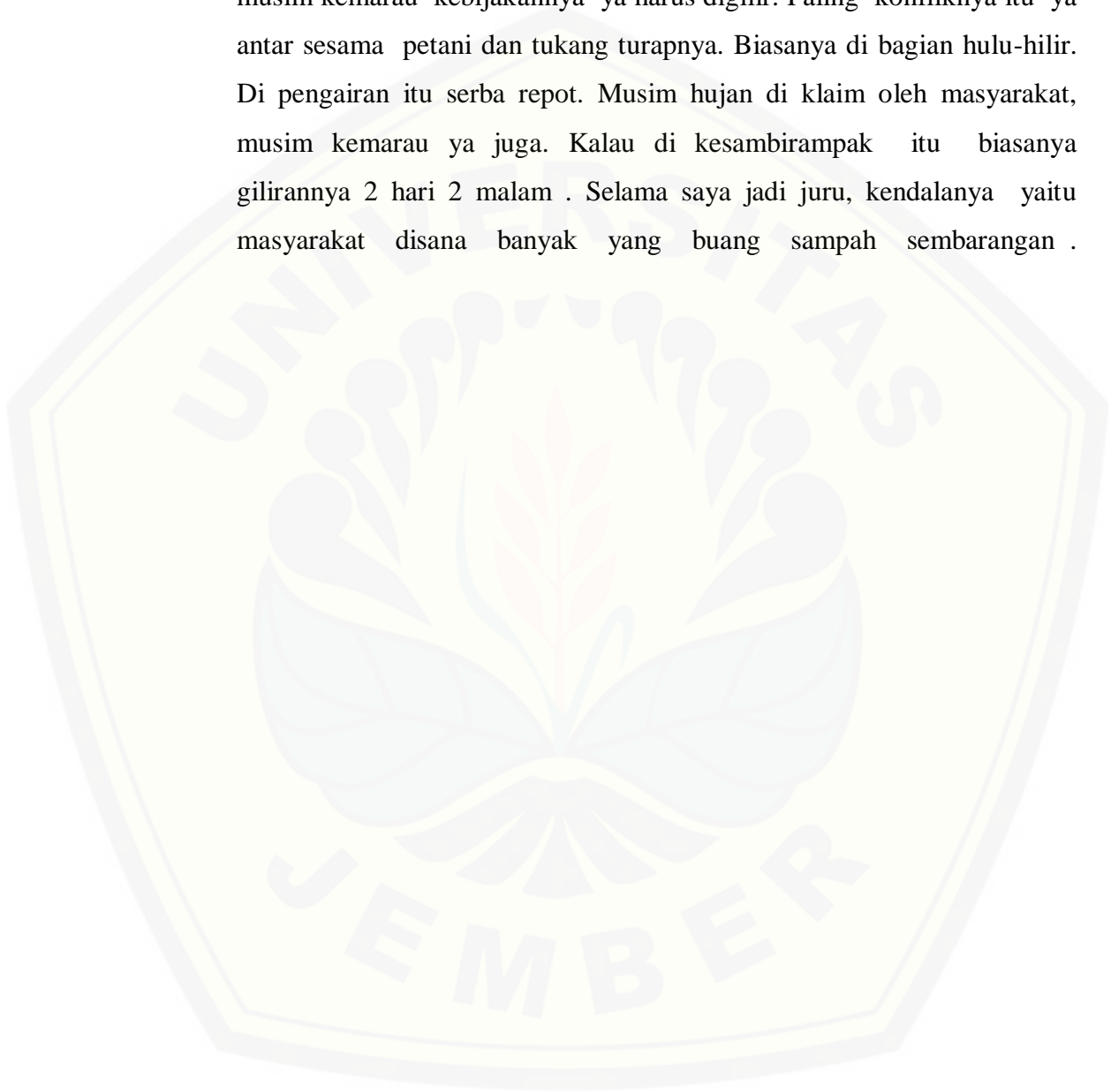
Peneliti: Bagaimana memantau pengelolaan air?

Informan:Ya tiap hari kadang memantau. Apalagi kalau terjadi giliran air .Biasanya ada yang mencuri air itu

Peneliti: Seberapa sering konflik pembagian air terjadi?

Informan: Ya gak pas sering. Konflik pembagian air terjadi dalam setiap musim.

Disini kan ada 2 musim , musim kemarau dan musim penghujan. Kalau musim kemarau kebijakannya ya harus digilir. Paling konfliknya itu ya antar sesama petani dan tukang turapnya. Biasanya di bagian hulu-hilir. Di pengairan itu serba repot. Musim hujan di klaim oleh masyarakat, musim kemarau ya juga. Kalau di kesambirampak itu biasanya gilirannya 2 hari 2 malam . Selama saya jadi juru, kendalanya yaitu masyarakat disana banyak yang buang sampah sembarangan .



TRANSKIP WAWANCARA**REJO****JUM'AT, 27 OKTOBER 2017**

Peneliti: Bagaimana cara ulu-ulu atau sub-blok untuk mendapatkan air?

Informan: Ya kalau ulu-ulu itu kan tukang turapnya , sedangkan Sub-blok itu istilahnya ya atasannya. Kalau mau mendapatkan air ya harus bekerja sama . Sub-blok yang membuka air di depan, sedangkan ulu-ulu yang mendistribusikan ke sawah petani.

Peneliti: Bagaimana aturan-aturan yang ada dalam Dinas Pengairan?

Informan: Ya kita harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kalau dari Dinas Pengairan aturannya dari pintu pengambilan 50 M tugasnya juru pengairan, lebih dari itu ya tugasnya HIPPA.

Peneliti: Apakah jika ada rapat yang dilakukan oleh HIPPA bersama sub-blok ikut berpartisipasi hadir?

Informan: Iya biasanya ikut. Di dalam pengairan dalam permasalahan air ya juru paling tau. Harus itu ikut.

Peneliti: Bagaimana hubungan Dinas Pengairan dengan HIPPA?

Informan: Ya sering. Biasanya itu konfliknya banyak terjadi diantara ulu-ulu dan petaninya yang mencuri air. Apalagi kalau musim kemarau . Kalau ada petani yang tidak mendapatkan jatah air, itu lah *paste nambek kaadek, tak ambu laporan-laporan*(sudah pasti membendung air duluan tanpa laporan dulu)

Peneliti: Bagaimana memantau pengelolaan air?

Informan: ya tiap hari kadang memantau, apalagi kalau terjadi giliran air. Jadi juru tugasnya berat, ya istilahnya jaga 24 jam itu.

TRANSKIP WAWANCARA**ROBI****JUM'AT, 10 November 2017**

Peneliti: Bagaimana cara ulu-ulu atau sub-blok untuk mendapatkan air?

Informan: Ya yang pasti itu ulu-ulu koordinasi dengan ulu-ulu yang lain. Selain dengan ulu-ulu, juga koordinasi dengan juru dan PPPA(Petugas Pengatur Pintu Air). Supaya distribusi air bisa masuk ke petak sawah, tapi ada juga beberapa wilayah yang terutama daerah hilir kadang itu perlu ada pembagian antara ulu-ulu yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, harus ada koordinasi.

Peneliti: Bagaimana aturan-aturan yang ada dalam Dinas Pengairan?

Informan: Kalau aturan dari Dinas Pengairan sudah jelas, sampai dimana batas kewenangan kita. Contoh, jika sampai di pintu pembagi, antara masuk saluran tersier batas kewenangan kita dari pintu sadap itu 50 M ke hilir. Setelah itu, sudah tugasnya HIPPA. Untuk membagi sesuai dengan luas baku sawah yang ada.

Peneliti: Apakah jika ada rapat yang dilakukan oleh HIPPA ikut berpartisipasi hadir?

Informan: Iya, tergantung undangannya

Peneliti: Siapa yang ditugaskan oleh Dinas Pengairan ikut rapat?

Informan: Kalau dari Dinas Pengairan tergantung dari undangannya. Tapi kalau dari HIPPA itu biasanya lebih ditujukan untuk juru. Karena yang punya wilayah itu kan pak juru. Rata –rata yang lebih banyak datang itu pak juru.

Peneliti: Bagaimana hubungan antara Dinas Pengairan dengan Ketua HIPPA?

Informan: Ya harus baik. Karena semua itu kan terikat , karena HIPPA dan Dinas Pengairan merupakan suatu wadah kontribusi air, ya istilahnya tangan kanan dari pemerintah lah yang diberikan tugas supaya air itu bisa di distribusi sampai ke petak sawah dengan baik dan adil. Kadang dari Dinas

Pengairan sudah mengajak HIPPA untuk lebih berkembang, kadang ya itu HIPPA nya baru turun Cuma ketika ada mau bantuan.

Peneliti: Bagaimana Dinas Pengairan menyikapi jika ada kerusakan Saluran Irigasi?

Informan: Selama masih masuk dalam wilayah kewenangan Dinas Pengairan, pihak Dinas Pengairan akan mengusulkan kepada instansi di atas kami yang istilahnya ya punya kewenangan lah. Kan dalam dinas ada seksi-seksinya masing, seperti perencanaan, pemeliharaan, operasi. Ada tim dari teman-teman yang memperbaiki. Contoh seperti di tersier, ada kewenangan 50 M dari pintu pengambilan ke hilir.

Peneliti: Seberapa sering konflik pembagian air terjadi?

Informan: Ya sering. Cuma itu merupakan hal yang bukan rahasia umum lagi. Pasti ada lah beberapa pencurian air. Apalagi kalau musim kemarau, pintu pengambilan itu harus dijaga. Karena kalau gak seperti itu, banyak ulu-ulu yang nakal. Malam-malam kadang ya buka air. Biar airnya masuk ke wilayahnya sendiri.

Peneliti: Bagaimana sanksi terhadap yang berkonflik?

Informan: Sanksinya ya cuma berupa teguran, HIPPA nya di panggil, Karena itu merupakan anak buah dari HIPPA, biasanya juga dipertemukan di desa, karena itu pencurian disebabkan kepentingan masing-masing lah. Nanti di kumpulkan, di situ ada dari pihak kecamatan, desa, Babinsa, Babinkatibnas, Kapolsek, dan Koramil. Biasanya yang paling banyak berperan itu ya Koramil dan Kapolsek.

Peneliti: Bagaimana memantau pengelolaan air?

Informan: Memantaunya ya dengan cara dibagi, kalau misal kondisi air di musim kemarau kurang, kita mengumpulkan semua sub-blok dan HIPPA. Menyampaikan kondisi debit air seperti ini, jadi harus dibagi. Istilahnya itu “gelondongan”.

c. Transkrip wawancara dengan Dinas Pertanian

TRANSKIP WAWANCARA**HENDRO PRASETYO****JUM'AT, 10 NOVEMBER 2017**

Peneliti: Bagaimana koordinasi Dinas Pertanian dengan:

Dinas Pengairan

Bapeda

HIPPA

LSM

Informan: Kalau Dinas Pengairan hubungannya itu ya mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengelolaan, dan sampai evaluasi. Terutama jaringan irigasi tersier. Kalau DPUPR, Bapeda, HIPPA, dan LSM itu kalau di kita kan ada komisi irigasi. Komisi irigasi itu nantinya memberikan masukan kepada Bupati untuk membuat kebijakan. Terkait dengan dengan pengelolaan irigasi

Peneliti : Bagaimana terkait dengan sistem pembagian jenis tanaman?

Informan: Pola tanam tergantung debit air. Kalau saluran irigasi sudah diatur terkait dengan misal petak tersier itu luasnya berapa, dari bendung itu berapa kemudian dibagi secara proporsional sampai dengan petak tersier. Jumlah tanaman ya disesuaikan dengan debit airnya. Jadwal pembagian debit air itu biasanya 10 tahun. Kalau pola tanam biasanya disitu ada PPL. Tapi ya jarang pola tanam petani itu menyesuaikan dengan PPL.

Peneliti: Bagaimana terkait dengan jadwal pengeringan saluran?

Informan: Kalau pengeringan saluran itu ada istilahnya pemeliharaan juga kondisi debit air. Ya disesuaikan dengan itu, tapi biasanya kalau pengeringan saluran ini biasanya kaitannya dengan Dinas Pengairan.

Peneliti: Siapa petugas pertanian yang ditugaskan jika ada kepentingan rapat oleh petani dan HIPPA?

Informan: Kalau permasalahannya misalnya dari HIPPA, disana ada Pembina dari tingkat desa, yaitu kepala desa. Kalau dari Dinas Pertanian disana ada penyuluh pertanian, kalau di kecamatan ada mantri tani. Ya disesuaikan dengan kondisinya.

Peneliti: Jika ada masalah HIPPA: Bagaimana menyikapinya? Siapa yang menyelesaikannya? Kontribusi pertanian apa?

Informan: Permasalahan kan banyak, mulai dari pembagian air, organisasi (kelembagaan), antara HIPPA dengan G-HIPPA, permasalahan koordinasi. Kayak Kapongan, sumbernya itu kan dari sampean lama. Tapi sampean lama terpengaruhi pembagian oleh air di sampean baru. G-HIPPA Kapongan itu sebenarnya bisa koordinasi dengan pengairan provinsi. Kalau ada masalah menyikapinya ya tergantung dari permasalahannya. kalau kemarin misalnya pembagian air yang sampean baru, perbandingannya situbondo-bondowoso berapa, termasuk yang dilepas ke sampean lama itu berapa, itu sampai balai besar brantas. Kalau pertanian kontribusinya yaitu perbaikan jaringan irigasi tersier, optimalisasi pemanfaatan air yang berupa bantuan Pompa Kepada HIPPA, bimbingan teknis pertanian di HIPPA, Pembagian tugas antara Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian, kayak legalisasi HIPPA itu masih masuk Dinas Pertanian.

Lampiran C. Foto Penelitian

FOTO PENELITIAN

a. Dinas Pengairan UPTD Kecamatan Panji, Pintu Saluran Irigasi, dan Kondisi Sawah



b. Kegiatan wawancara





Lampiran D. Surat Telah Melakukan Penelitian



